



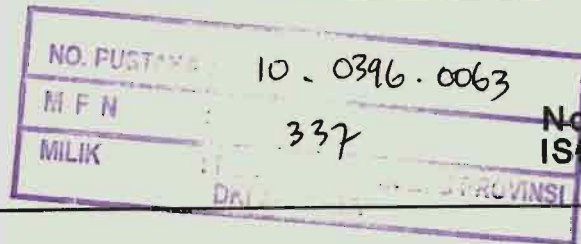
Nomor: 31560.9602
ISBN : 979.474.274.0

STUDI NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA 1991-1992



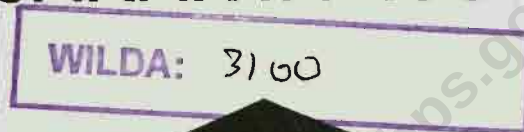
KANTOR STATISTIK *BPS* PROPINSI DKI JAKARTA

<https://jakarta.bps.go.id>



Nomor: 31560.9602
ISBN : 979.474.274.0

STUDI NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA 1991-1992



KANTOR STATISTIK *BPS* PROPINSI DKI JAKARTA

STUDI NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA 1991-1992

ISBN : 979.474.274.0
NO. PUBLIKASI : 31560.9602

NASKAH:

BIDANG NERACA WILAYAH DAN ANALISIS

GAMBAR KULIT

BIDANG NERACA WILAYAH DAN ANALISIS

DITERBITKAN OLEH:

KANTOR STATISTIK PROPINSI
DKI JAKARTA

BOLEH DIKUTIP DENGAN MENYEBUTKAN SUMBERNYA

<https://jakarta.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi "Neraca Arus Dana DKI Jakarta 1991-1992 merupakan publikasi perdana yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta. Publikasi ini masih merupakan studi, sebagai embrio penyusunan dan penyempurnaan Neraca Arus dana DKI Jakarta untuk tahun-tahun mendatang.

Angka-angka yang disajikan dalam publikasi ini disadari masih mengandung beberapa kelemahan, terutama dari segi metodologi dan sumber data. Oleh karena itu masukan dan kritik dalam rangka penyempurnaannya sangat diharapkan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga tersusunnya publikasi ini disampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 1996

KANTOR STATISTIK PROPINSI
DKI JAKARTA

Kepala,



ABDUL KADIR HASIBUAN, MSc

NIP 340000764

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	3
1.3 Sistematika Pelaporan	3
II. KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA	5
2.1 Penjelasan Umum	5
2.2 Kerangka Teori NAD.	6
2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Regional	7
2.4 Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan	11
2.5 Kegunaan Neraca Arus Dana	14
2.6 Masalah Keterbatasan NAD.	17
III. NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA	23
3.1 Pendekatan yang Digunakan	23
3.2 Kerangka NAD DKI Jakarta.	24
IV. NERACA DESKRIPSI NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA	34
4.1 Peranan Lembaga Keuangan di DKI Jakarta terhadap Nasional	34
4.2 Neraca Pembiayaan Modal Sektor.	38
4.3 Celah Investasi dan Tabungan.	45
4.4 Keterkaitan Finansial Antar Sektor.	48
V. KESIMPULAN DAN SARAN	54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL-TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Besarnya penciptaan nilai tambah dan tingginya laju pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari besarnya investasi yang ditanamkan. Untuk membiayai investasi tersebut berbagai sumber dana dikerahkan baik yang berasal dari dalam DKI Jakarta sendiri maupun dari luar DKI Jakarta.

Dalam memperlancar proses pembiayaan investasi tersebut peran lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya sangat diperlukan. Sebagai perantara finansial yang menghubungkan penyedia dana (sektor surplus) dan sektor yang membutuhkan dana (sektor defisit), peran lembaga keuangan menjadi semakin menonjol, terutama setelah adanya reformasi ekonomi ekonomi, khususnya di bidang perbankan pada tahun 1980-an.

Besarnya peran lembaga keuangan juga tercermin dalam struktur perekonomian DKI Jakarta, yakni memberikan kontribusi sebesar 23 persen. Luasnya peran sektor lembaga keuangan dalam perekonomian DKI Jakarta selain ditunjang oleh banyaknya jumlah bank di DKI Jakarta, hampir seluruh kantor-kantor pusat bank dan lembaga keuangan lainnya berada di DKI Jakarta, juga karena sebagian besar transaksi finansial yang terjadi antarpelaku ekonomi dilakukan di DKI Jakarta.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka arus finansial dari sektor surplus kepada sektor defisit yang terjadi di DKI Jakarta menjadi semakin kompleks dan beragam. Perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat dalam sektor finansial ini perlu dicatat dan dipantau

secara berkala dalam satu sistem data yang lengkap, komprehensif dan konsisten sehingga berguna sebagai masukan dalam menentukan arah kebijaksanaan ekonomi dan moneter secara lebih tepat. Sistem data dimaksud selanjutnya disebut Neraca Arus Dana (NAD).

Selama ini sistem data mengenai statistik produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian daerah telah disajikan secara berkala baik dalam Statistik Pendapatan Regional maupun Tabel Input Output DKI Jakarta. Neraca-neraca ini hanya menggambarkan besarnya produksi, nilai tambah, pengeluaran konsumsi dan pembentukan modal yang terjadi di masing-masing sektor. Kemudian bagaimana masing-masing sektor ini memperoleh dan memanfaatkan tabungannya, baik untuk membiayai investasi real maupun investasi finansial belum tercakup di dalam sistem tersebut. Demikian pula sektor-sektor yang terpaksa melakukan pinjaman untuk membiayai investasi real karena tabungannya tidak memadai, serta jenis-jenis instrumen finansial apa yang digunakan untuk melakukan pinjaman tersebut belum tergambarkan dalam neraca-neraca di atas. Neraca Arus Dana mencoba mencatat seluruh transaksi ini dari sisi finansialnya, sehingga tergambar arus finansial yang terjadi dari sektor surplus ke sektor defisit. Arus finansial tersebut lebih lanjut merefleksikan perubahan harta dan kewajiban finansial melalui perubahan instrumen-instrumen seperti tabungan, pembelian saham, perubahan uang kas, hutang, piutang dan sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhan di atas, Kantor Statistik DKI Jakarta melakukan studi penyusunan NAD sebagai langkah awal dalam mewujudkan NAD yang sebenarnya. Mengingat adanya keterbatasan data, maka dalam studi ini digunakan data tahun 1991-1992.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjajaki pembuatan kerangka NAD sebagai sistem data finansial terpadu. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan suatu kesempatan bagi peneliti di bidang ekonomi moneter dan peneliti lainnya melakukan analisis yang lebih komprehensif.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan data guna mendukung penyusunan NAD DKI Jakarta.
3. Manfaat yang diperoleh dari penyusunan NAD tersebut adalah tersedianya data finansial menurut institusi yang lebih lengkap.
4. Mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peranan lembaga keuangan dan bukan keuangan di DKI Jakarta terhadap nasional.

1.3 Sistematika Pelaporan

Pelaporan hasil studi NAD ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan, menguraikan latar belakang penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pelaporan.
- Bab II: Kerangka Teori Neraca Arus Dana, menguraikan mengenai definisi dan kerangka teori NAD, kemudian dijelaskan pula mengenai hubungan NAD dengan neraca perusahaan serta kegunaan NAD.
- Selain itu diutarakan juga mengenai masalah dan keterbatasan yang dihadapi dalam penyusunan NAD.
- Bab III: Neraca Arus Dana DKI Jakarta, menguraikan tentang pendekatan yang digunakan dalam penyusunan NAD, kerangka NAD, sumber data dan metode estimasi.

Bab IV: Analisis Deskriptif NAD DKI Jakarta, menguraikan secara deskriptif mengenai struktur investasi dan tabungan sektoral celah investasi, peranan finansial sektoral dan keterkaitan struktur finansial sektoral.

Bab V: Kesimpulan, memberikan ringkasan hasil studi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB II

KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA

2.1 Penjelasan Umum

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data yang dirancang untuk memperlihatkan transaksi finansial antar berbagai sektor ekonomi, misalnya: pemerintah, perusahaan, asuransi, bank umum, perusahaan swasta nonfinansial, dan sebagainya. Setiap sektor dalam NAD memiliki seperangkat sumber dan penggunaan dana yang dibentuk oleh adanya pembelian dan penjualan berbagai jenis instrumen finansial, seperti: deposito, obligasi, pinjaman dan sebagainya. Instrumen ini merupakan komponen harta atau kewajiban finansial dari masing-masing sektor. Karena sistem ini memasukkan juga sektor luar DKI Jakarta sebagai salah satu sektornya, maka disebut juga sebagai sistem yang tertutup untuk setiap transaksi. Dengan kata lain, setiap pembelian instrumen finansial pada suatu sektor akan menjadi penjualan di sektor lain. NAD juga dapat dilihat sebagai suatu perangkat data yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana tabungan dihubungkan dengan sektor-sektor surplus dan defisit.

NAD merupakan salah satu bagian dari sistem neraca regional disamping Pendapatan Regional dan Tabel Input Output. Neraca Pendapatan Regional dan Tabel Input Output menggambarkan kegiatan produksi atau pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dikenal juga dengan sebutan neraca real. Sedangkan NAD sebagai neraca modal menunjukkan transaksi neraca keuangan yang memungkinkan terjadinya kegiatan di sektor real.

Bab ini menjelaskan secara umum kerangka teori dan cara penyusunan NAD. Di samping itu, diuraikan pula kedudukan NAD dalam sistem neraca regional. Untuk para pengguna NAD, diberikan pula uraian tentang kegunaan NAD untuk perencanaan dan analisis ekonomi makro. Sedangkan pada akhir bab ini diuraikan beberapa masalah dan keterbatasan NAD.

2.2 Kerangka Teori NAD

Secara sederhana, NAD menggambarkan bagaimana tabungan dalam perekonomian digunakan untuk membiayai investasi. Dalam ekonomi makro ada satu persamaan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tabungan sama dengan investasi, tetapi persamaan ini tidak berlaku untuk masing-masing sektor ekonomi secara terpisah. Untuk ekonomi secara keseluruhan, pendapatan (Y) sama dengan konsumsi (C) ditambah investasi (I) atau $Y = C + I$. Jika tabungan didefinisikan sebagai $S = Y - C$, maka $S = I$.

Biasanya pendapatan sektor rumah tangga secara makro selalu lebih besar dari pengeluaran, sebaliknya sektor swasta nonfinansial selalu defisit. Dengan demikian, sektor swasta nonfinansial harus meminjam dari sektor rumah tangga. Sektor lainnya, misalnya bank, merupakan perantara keuangan yang menghimpun dana dari beberapa sektor dan menyalurkan ke sektor lain. NAD, menyediakan data keuangan secara rinci mengenai pinjam-meminjam tersebut melalui berbagai instrumen finansial.

Data NAD biasanya disajikan dalam bentuk matriks. Kolomnya menggambarkan sektor dan barisnya menggambarkan berbagai jenis instrumen finansial. Setiap sektor mempunyai dua kolom, yang pertama menunjukkan perubahan harta (penggunaan dana) dan yang

kedua merupakan perubahan kewajiban (sumber dana). Kenaikan jumlah harta maupun kewajiban suatu sektor dicerminkan oleh arus finansial positif, sebaliknya penurunan harta atau kewajiban ditunjukkan oleh arus finansial negatif. Arus tersebut menunjukkan konsep "net" dalam pengertian bahwa suatu sektor dapat mempunyai arus yang berasal dari transaksi bulanan, harian dan mungkin untuk instrumen finansial tertentu dapat terjadi setiap saat. Padahal dalam NAD hanya dicatat perubahan dalam setahun. Konsep net semacam ini, secara sederhana diperoleh dengan cara mengurangkan neraca akhir dan awal tahun, dengan mengabaikan masalah revaluasi.

Tabel 2.1 menggambarkan contoh NAD yang disederhanakan. Dalam contoh ini ada lima sektor yang ditampilkan yaitu sektor keuangan, rumah tangga, pemerintah, bisnis dan luar DKI Jakarta. Sektor luar DKI Jakarta memperlihatkan transaksi antara bukan penduduk dan penduduk DKI Jakarta. Di samping itu, dalam contoh ini hanya beberapa jenis kategori transaksi yang dicantumkan.

2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Regional

Dalam sistem neraca regional (integrated system regional accounts) setidaknya ada 4 neraca pokok yaitu: neraca produksi, neraca pendapatan dan pengeluaran, neraca modal dan neraca luar negeri, yang harus disajikan. Neraca produksi memperlihatkan bagaimana nilai tambah diciptakan oleh ekonomi, baik menurut lapangan usaha maupun komponen penggunaannya. Neraca pendapatan dan pengeluaran memperlihatkan berapa besar tabungan yang merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya neraca modal memperlihatkan berapa besar kemampuan tabungan dalam

membiayai pembentukan modal dan berapa pinjaman neto yang harus dilakukan. Sedangkan neraca luar DKI Jakarta memperlihatkan transaksi dengan dengan luar daerah baik dalam bentuk barang dan jasa maupun pinjaman dan transfer modal.

Bila sistem nerana regional dikaitkan dengan sistem neraca arus dana, maka ada dua neraca yang mempunyai hubungan erat, yaitu neraca pendapatan dan pengeluaran dan neraca modal. Dari neraca pendapatan dan pengeluaran dapat diturunkan tabungan bruto, dari neraca modal dapat diturunkan pembentukan modal tetap dan pinjaman neto. Dalam NAD, pinjaman neto ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perubahan instrumen-instrumen baik di sisi pengeluaran maupun sumber.

Neraca pendapatan dan pengeluaran (*income and outlay accounts*) pada intinya merupakan gabungan dari neraca pendapatan dan pengeluaran sektoral, yang dalam beberapa hal dapat dipersamakan dengan laporan rugi laba perusahaan. Dalam sistem neraca ini juga berlaku suatu persamaan yang menunjukkan bahwa pengeluaran suatu sektor merupakan pendapatan di sektor lainnya. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran sama dengan tabungan (bisa positif maupun negatif). Istilah pengeluaran yang digunakan di sini tidak termasuk pengeluaran untuk harta finansial maupun nonfinansial (disebut *current expenditure*). Angka yang berasal dari neraca pendapatan dan pengeluaran selanjutnya dibawa ke dalam neraca modal (*capital finance accounts*), yang mencatat sumber dan penggunaan dana menurut rincian transaksi modal. Neraca terakhir ini mencatat tabungan bruto dan pembentukan modal atau harta real yang terdiri dari pembentukan modal tetap bruto ditambah stok. Dalam NAD juga dicatat pembelian neto barang tak

berwujud, seperti: hak paten dan nama baik (goodwill) walaupun data semacam ini tidak lengkap atau belum tersedia saat ini.

Jumlah sektor dalam neraca pendapatan dan pengeluaran, dan neraca modal lebih sedikit dibandingkan jumlah sektor dalam NAD, bahkan untuk beberapa negara yang sudah menyusunnya, beberapa sektor NAD hanya diwakili oleh satu sektor saja.

NAD juga mempunyai kaitan dengan sistem neraca pembayaran. Dalam NAD surplus/defisit neraca pembayaran adalah negatif/positif tabungan di sektor luar DKI Jakarta untuk NAD. Bagian modal dalam neraca pembayaran mencatat transaksi luar DKI Jakarta menurut instrumen finansial. NAD juga mencatat hal yang serupa tetapi mungkin berbeda dalam kategori dan rinciannya.

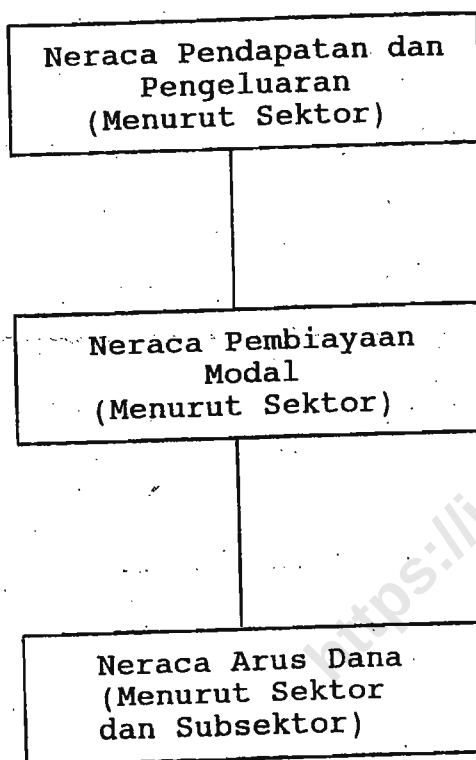
Penyusunan NAD memerlukan data rinci mengenai kegiatan pinjam-meminjam yang terjadi dari beberapa sektor defisit lainnya dalam pasar finansial. Dalam terminologi ekonomi, NAD didefinisikan sebagai suatu sistem data keuangan yang menyajikan data keuangan yang rinci sekaligus konsisten dengan data dari neraca real (tabungan dan investasi) yang berasal dari neraca pendapatan DKI Jakarta.

Kegiatan pasar finansial sebagian ditentukan oleh variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga dan penawaran berbagai jenis instrumen finansial. NAD menyediakan data yang penting untuk melakukan analisis secara empiris. Misalnya untuk melihat interaksi antara tabungan dan investasi, hutang piutang, perilaku perantara finansial, dan menentukan tingkat suku bunga.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kaitan antara neraca pendapatan dan pengeluaran, dan neraca modal dengan neraca arus dana diberikan seperti dalam Bagan 1 berikut.

BAGAN 1

Kaitan antara Neraca Arus Dana dan Sistem Neraca Nasional



NERACA BERJALAN:

Pendapatan minus pengeluaran sama dengan tabungan bruto (Tabungan neto tidak termasuk penyusutan barang modal)

NERACA MODAL:

Tabungan bruto minus perolehan harta nonfinansial (pembentukan modal tetap) sama dengan pinjaman neto

NERACA ARUS DANA:

Menyediakan data rinci mengenai kegiatan pasar finansial (dengan cara merinci pinjaman neto)

Berdasarkan Bagan 1 dapat ditelusuri neraca berjalan yang menyajikan data mengenai rincian pendapatan dan pengeluaran masing-masing sektor. Selisih pendapatan dan pengeluaran ini menghasilkan tabungan bruto, karena di dalamnya masih termasuk komponen penyusutan barang modal. Dalam neraca modal digambarkan bagaimana barang modal dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan. Selisih antara tabungan bruto yang berasal dari neraca pendapatan

dan pengeluaran dengan dengan jumlah pembentukan barang modal merupakan pinjaman neto. Nilainya bisa positif atau negatif. Selanjutnya pinjaman neto tersebut dalam NAD dirinci lagi ke dalam berbagai jenis instrumen finansial dan sektor pelakunya.

2.4 Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan

Perusahaan biasanya membuat paling sedikit dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan rugi-laba dan neraca. Dalam laporan rugi-laba dicatat pendapatan dan pengeluaran berjalan selama periode tertentu, biasanya satu tahun atau satu triwulanan. Sedangkan dari neraca diperoleh data mengenai harta, hutang dan modal perusahaan pada satu saat tertentu, biasanya keadaan akhir tahun atau akhir triwulanan. NAD disusun berdasarkan data neraca, tetapi arusnya dihitung sebagai perubahan posisi finansial selama periode tertentu.

Berdasarkan persamaan akuntansi berlaku hubungan yang menyatakan bahwa jumlah harta (sisi aktiva) sama dengan jumlah kewajiban (sisi pasiva) atau kalau ditulis dalam bentuk persamaan akuntansi menjadi:

$$\text{Harta} = \text{Kewajiban}$$

Sisi kewajiban biasanya terdiri dari dua bagian, **Hutang** dan **Modal**. Bagian pertama merupakan kewajiban terhadap pihak ketiga dan yang terakhir merupakan kewajiban terhadap pemilik modal. Dengan demikian persamaan di atas dapat dirubah menjadi:

$$\text{Harta} = \text{Hutang} + \text{Modal}$$

Dalam terminologi NAD harta selalu diklasifikasikan menjadi **harta real** dan **harta finansial**. Harta real mencakup semua barang modal seperti gedung, bangunan, mesin dan peralatan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun. Untuk menjamin kelangsungan kegiatan perusahaan, maka disisihkan sebagian dana untuk mengganti barang modal tersebut di masa datang, atau **penyusutan barang modal**. Angka ini dicatat dengan tanda negatif di sisi harta. Dengan demikian persamaannya menjadi:

$$\text{HARTA REAL} + \text{HARTA FINANSIAL} - \text{PENYUSUTAN} = \text{HUTANG} + \text{MODAL}$$

atau

$$\text{HARTA REAL (HR)} + \text{HARTA FINANSIAL (HF)} = \text{HUTANG (U)} + \text{MODAL DAN PENYUSUTAN (MP)}$$

Dengan demikian subskrip t dan $t-1$ untuk menyatakan dua tahun neraca yang berurutan ke dalam persamaan di atas diperoleh dua persamaan berikut:

$$\text{HR}_t + \text{HF}_t = \text{U}_t + \text{MP}_t$$

dan

$$\text{HR}_{t-1} + \text{HF}_{t-1} = \text{U}_{t-1} + \text{MP}_{t-1}$$

Sekarang jika kedua persamaan ini dikurangkan diperoleh besaran yang menunjukkan selisih dua level neraca atau arus yang terjadi pada tahun t dan diberi simbol:

$$\text{HR}_t + \text{HF}_t = \text{U}_t + \text{MP}_t$$

Dengan mengganti MP_t dengan TB_t (tabungan bruto) persamaan di atas dapat disusun kembali menjadi:

$$HF_t - U_t = TB_t - HR_t$$

Berdasarkan persamaan terakhir dapat dikatakan bahwa jika perusahaan membelanjakan lebih banyak dananya untuk barang modal melebihi tabungan brutonya, maka perusahaan ini disebut sebagai peminjam (sektor defisit). Sebagai peminjam tidak berarti menghalanginya untuk membeli berbagai harta finansial atau membayar hutang. Kegiatan finansial sebenarnya merupakan kombinasi pembelian harta finansial dan pembayaran hutang untuk memenuhi tingkat pinjaman netto yang telah ditentukan. Persamaan ini dapat ditulis kembali menjadi:

$$TB_t + U_t = HR_t + HF_t$$

dan memperlihatkan jumlah sumber dana baik yang berasal dari dana yang dihasilkan sendiri (tabungan bruto) maupun dana yang diperoleh dari luar (hutang) sama dengan jumlah penggunaan dana (penambahan harta real dan harta finansial).

Persamaan di atas dapat dipakai sebagai pendekatan untuk menyusun NAD masing-masing sektor, selama sektor bersangkutan mempunyai neraca. Karena dalam matriks NAD sektor pelaku ekonomi disajikan menurut kolom, maka identitas ini disebut "identitas kolom".

Seperti dijelaskan di atas bahwa jumlah sumber dana setiap sektor dalam NAD harus sama dengan jumlah penggunaan dananya. Karena NAD secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang tertutup, maka setiap transaksi finansial yang terjadi harus

melibatkan dua pelaku, yaitu pembeli dan penjual. Dengan demikian jumlah pembelian untuk setiap instrumen finansial sama dengan jumlah penjualannya, atau dengan kata lain jumlah perubahan suatu harta sama dengan jumlah perubahan kewajiban untuk kategori finansial yang sama. Karena dalam matriks NAD kategori instrumen finansial disajikan menurut baris, maka identitas ini disebut "identitas baris."

2.5 Kegunaan Neraca Arus Dana

Salah satu manfaat dalam penyusunan NAD adalah tersedianya suatu perangkat data keuangan makro dalam bentuk yang lengkap dan konsisten. Lengkap dalam pengertian bahwa NAD melibatkan seluruh instrumen finansial dan pelakunya. NAD juga konsisten artinya data keuangan yang disajikan harus mengikuti aturan tertentu. Misalnya, jumlah sumber dan penggunaan setiap instrumen finansial untuk keseluruhan ekonomi harus sama besarnya. Begitu pula jumlah seluruh sumber dan penggunaan untuk setiap sektor harus sama besarnya. Dengan demikian NAD dapat digunakan sebagai dasar analisis ekonomi makro, khususnya dalam bidang moneter.

Uraian berikut menunjukkan beberapa kegunaan NAD.

2.5.1 Pangkalan Data

NAD merupakan suatu pangkalan data (data base), yang menyediakan catatan-catatan transaksi keuangan secara lengkap dan konsisten. Berdasarkan informasi ini dapat dibuat analisis deskriptif mengenai kegiatan menyeluruh pasar uang dan modal.

2.5.2 Alat Analisis

NAD banyak dipakai oleh para pengguna data sebagai alat analisis. Bagi pengamat ekonomi makro yang tertarik dalam menganalisis kaitan antar sektor finansial dan real dapat menggunakan informasi tabungan dan investasi real.

Pengamat lain yang tertarik untuk melihat secara lebih tajam perilaku keuangan sektor tertentu, misalnya sektor swasta non finansial, dapat menggunakan data deret berkala untuk menghitung berbagai jenis rasio, seperti rasio dana yang berasal dari hutang-hutang terhadap modal saham, pinjaman jangka pendek terhadap pinjaman jangka panjang. Apalagi jika data tersedia tidak hanya dalam bentuk arus tetapi juga dalam bentuk level, maka pengamat dapat menggunakan keduanya secara bersamaan. Sektor rumah tangga merupakan sektor yang sering diminati para pengamat ekonomi.

Jumlah perubahan harta dan kewajiban lancar seperti deposito dan kredit konsumen dapat digunakan untuk melihat hubungan antara tabungan dan pengeluaran rumah tangga.

2.5.3 Penerapan Teori Portfolio

Berdasarkan teori portfolio, pelaku ekonomi apakah sebagai individu atau perusahaan melakukan investasinya ke berbagai jenis instrumen finansial sesuai dengan hubungan antara hasil dan resiko yang ditawarkan oleh pasar. Jika diabaikan biaya transaksi masing-masing jenis portfolio, maka para pelaku ekonomi akan melakukan perilaku investasinya sesuai dengan perubahan rasio masing-masing portfolio. Dalam konteks keseimbangan relatif dari penawaran suatu aset hanya akan

diterima pelaku ekonomi jika keuntungan relatif atas aset tersebut juga meningkat atau harganya lebih rendah.

Dalam model portfolio yang lengkap, biaya transaksi juga diperhitungkan sehingga memberikan gambaran yang lebih realitas. Teori portfolio ini dapat diterapkan secara sederhana dengan menggunakan kerangka NAD.

2.5.4 Arus Penawaran dan Permintaan untuk Menentukan Suku Bunga

Pengamat ekonomi yang tertarik dalam meramalkan tingkat suku bunga dapat memanfaatkan arus finansial sebagai alatnya. Prosedur sederhana yang dilakukan adalah memperkirakan jumlah permintaan satu atau lebih instrumen finansial melalui tingkat pertumbuhan portfolio sektor-sektor yang biasanya memegang instrumen tersebut seperti bank dan asuransi jiwa. Kemudian secara terpisah diperkirakan penawaran instrumen tersebut. Adanya kelebihan permintaan dibanding penawaran terhadap suatu atau lebih instrumen, pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan penawaran hingga mencapai titik keseimbangan umum. Melalui iterasi dan penyesuaian untuk mencapai titik tersebut akan dapat diperkirakan tingkat suku bunga yang terjadi.

Arus Penawaran dan Permintaan untuk Perencanaan dan Proyeksi

NAD dapat digunakan untuk memperkirakan arus investasi sektoral sebagai masukan bagi perencanaan nasional.

Yang digunakan untuk memperkirakan tersebut adalah menggunakan rasio tetap

masing-masing sektor. Prosedur sederhana ini harus dimodifikasi agar mendapatkan hasil yang lebih mendekati kenyataan. Hal ini dilakukan karena, pertama, arus finansial biasanya berfluktuasi cukup besar dari tahun ke tahun. Untuk melakukan modifikasi dapat digunakan rasio rata-rata tiga sampai lima tahunan. Kedua, hendaknya dibuat secara iteratif dan disesuaikan dengan memperhatikan konsistensi angka-angka dalam kerangka NAD baik secara sektoral maupun keseluruhan. Kadang-kadang, dalam proses penyesuaian ini didapatkan pula beberapa informasi tidak langsung.

Dalam konteks membuat perencanaan dapat dimulai dengan perkiraan investasi real untuk masing-masing sektor, kemudian diikuti dengan perkiraan besarnya tabungan yang dapat diciptakan masing-masing sektor dengan menggunakan rasio NAD. Berdasarkan perkiraan tersebut dapat diperkirakan nilai dari pinjaman neto dan variabel-variabel terkait lainnya.

2.6 Masalah dan Keterbatasan NAD

Masalah utama yang biasanya dihadapi dalam penyusunan NAD adalah keterbatasan data yang tersedia. Untuk itu beberapa alternatif pendekatan dan penggunaan metode sampling tak dapat dihindarkan. Di samping kelemahan sumber data, di bawah ini dijelaskan pula beberapa keterbatasan NAD berkaitan dengan pendekatan yang digunakan. Misalnya pendekatan dengan menggunakan neraca sebagai sumber data membawa implikasi terhadap pengukuran arus finansial, konsolidasi neraca dan arus sebenarnya (true flows).

2.6.1 Pengukuran Arus Finansial

Paling tidak terdapat dua kelemahan jika arus finansial disusun berdasarkan neraca akhir tahun. Pertama, NAD hanya mencatat perubahan dari pos-pos neraca untuk periode satu tahun. Padahal selama periode ini banyak terjadi perubahan yang cukup berarti, terutama untuk harta lancar seperti kas dan deposito. Kedua, pengertian sumber atau penggunaan dana tidak sama dengan sumber atau penggunaan kas. Penurunan dalam kas dapat berarti penurunan kas sebenarnya atau juga penurunan dana. Tapi penurunan piutang dagang misalnya, belum berarti penurunan kas.

2.6.2 Konsolidasi dan Gabungan Neraca

Agar dapat menyusun neraca finansial untuk sektor secara keseluruhan, neraca-neraca individu yang merupakan anggota sektor tersebut harus dikelompokkan. Pengelempokkan ini dapat dilakukan dengan cara konsolidasi atau gabungan. Jika dilakukan konsolidasi dari masing-masing neraca dalam sektor tertentu, maka terjadi penghapusan beberapa pos yang saling menghilangkan, tetapi masih tercatat baik sebagai harta maupun kewajiban.

Untuk menyusun NAD suatu sektor berdasarkan metode konsolidasi harus tersedia secara rinci data mengenai dari dan untuk siapa harta dan kewajiban sektor tersebut. Tetapi dalam praktek data semacam ini sangat jarang diperoleh, terkecuali untuk sektor luar negeri. Oleh karena itu NAD umumnya disusun dengan metode gabungan.

2.6.3 "Arus Sebenarnya" Lawan "Perubahan Level dalam Neraca"

Secara umum, arus keuangan dihitung dari perbedaan dua neraca akhir tahun yang berurutan. Angka ini biasanya sama dengan transaksi sebenarnya (true flows) selama periode tersebut. Walaupun begitu, ada beberapa pos neraca yang transaksinya tidak menggambarkan nilai sebenarnya, yaitu yang diakibatkan karena: (1) Keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, (2) Capital gains and Losses, (3) Perubahan klasifikasi sektor dan (4) Perubahan dalam prosedur akuntansi atau penyusunan laporan keuangan.

(1) Keuntungan atau Kerugian Akibat Perubahan Kurs

Nilai ekuivalen rupiah terhadap harta atau kewajiban dalam mata uang asing dapat berubah atau lebih tinggi dari tahun ke tahun sebagai akibat dari perubahan kurs yang terjadi. Dengan demikian, perubahan dalam level (yang dinyatakan dalam rupiah) dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam penggunaan kurs.

Idealnya nilai "true flows" dalam rupiah seharusnya dihitung dari data setiap transaksi yang dinyatakan dalam mata uang asing baik untuk harta atau kewajiban, dengan menggunakan nilai tukar yang sebenarnya bagi transaksi tersebut. Akan tetapi data yang sifatnya transaksi individu jumlahnya sangat besar dan datanya sulit diperoleh. Dalam NAD, arus mata uang asing dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut:

Pos-pos neraca yang menggunakan mata uang asing tetapi dilaporkan dalam ekuivalen rupiah (menggunakan kurs pada akhir periode) harus dikonversikan kembali dalam mata uang

asing menggunakan kurs yang sama. Demikian pula dilakukan untuk periode sebelumnya dengan menggunakan kurs yang sesuai. Dari sini dapat dihitung arus finansial dalam mata uang asing. Langkah berikutnya adalah mencari kurs yang sesuai untuk mendapatkan arus pos neraca tersebut dalam nilai rupiah. Kurs yang baik adalah menggunakan rata-rata kurs bulanan yang ditimbang dengan jumlah nilai transaksi masing-masing bulan. Jika prosedur semacam ini dilakukan angkanya akan mendekati arus sebenarnya.

(2) Capital gains and Losses serta Revaluasi

Perusahaan atau pemerintah dapat saja menyesuaikan nilai hartanya seperti: tanah, gedung dan peralatan serta penyertaan dalam bentuk saham diperusahaan lain sesuai dengan harga pasar. Setiap kenaikan/penurunan nilai harta akibat penyesuaian harga harus diikuti dengan kenaikan/penurunan modal. Kenaikan/penurunan modal ini dapat disamakan dengan laba/rugi yang diakibatkan capital gains/losses yang tercermin dalam laporan rugi/laba. Walaupun begitu, sistem neraca nasional tidak memperlakukan capital gains/losses sebagai pendapatan karena data ini tidak mengukur nilai produksi sebenarnya. Karena data yang tersedia untuk penyusunan NAD sebagian besar adalah laporan keuangan perusahaan, maka penilaian kembali apakah menaikkan atau menurunkan harta atau penambahan/pengurangan tabungan dianggap sebagai arus dalam NAD. Kasus ini merupakan salah satu ilustrasi perbedaan antara nilai arus sebenarnya dengan perbedaan dua level neraca.

(3) Perubahan Klasifikasi Sektor

Jika perusahaan atau pelaku ekonomi lainnya melakukan perubahan terhadap kepemilikan, anggaran dasar atau bidang usahanya kemungkinan akan terjadi perubahan klasifikasi perusahaan atau pelaku ekonomi tersebut kedalam sektor NAD. Perubahan klasifikasi perusahaan ini dapat menyebabkan penurunan level neraca suatu sektor, tetapi sebaliknya akan menaikkan sektor NAD yang lain. Penurunan dan kenaikan tidak berpengaruh pada nilai arus sebenarnya, karena kenyataannya tidak ada arus dana yang berhubungan dengan perubahan klasifikasi itu sendiri. Walaupun begitu laporan sumber dan penggunaan dana untuk perusahaan tersebut tetap dicatat dalam NAD berdasarkan klasifikasi baru.

(4) Perubahan dalam Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan

Banyak kasus menunjukkan bahwa perubahan prosedur akuntansi yang dilakukan perusahaan dapat menyebabkan perubahan beberapa pos neraca, yang pada akhirnya merubah level neraca keseluruhan. Misalnya, penilaian pada akhir tahun akan berbeda bila digunakan sistem "Last in first out" (LIFO) atau "First in first out" (FIFO). Perubahan ini seharusnya tidak berpengaruh pada perhitungan sebenarnya, tetapi tetap tercakup pada NAD karena didasarkan pada data yang ada. Perubahan sistem pelaporan juga dapat mengganggu sistem penyusunan NAD. Misalnya, sebelumnya diperoleh laporan keuangan terpisah antara induk dan cabang dari suatu perusahaan yang sama. Tetapi karena sistem pelaporan tersebut yang sekarang hanya dapat memberikan neraca

konsolidasi, seolah-olah terjadi penurunan level neracanya, karena transaksi antara induk dan cabang tidak diperhitungkan.

(5) Perkiraan berdasarkan Sampel

Karena keterbatasan data yang dapat dikumpulkan, NAD untuk beberapa sektor seperti perusahaan non finansial, hanya didasarkan pada sampel sejumlah neraca perusahaan. Di samping itu jumlah sampel yang digunakan sebagai dasar estimasi mungkin pula berubah-ubah dari tahun ke tahun. Akibatnya perubahan level neraca gabungan sangat tergantung pada jumlah sampel yang tersedia, dan pada gilirannya dapat menghasilkan arus yang keliru dalam NAD tanpa mengetahui besarnya tingkat kesalahan. Masalah ini dapat diatasi misalnya dengan cara menghitung arus dana masing-masing tahun, berdasarkan jumlah sampel tertentu yang konsisten, atau dengan memperlihatkan adanya penambahan atau pengurangan sampel untuk masing-masing individu.

BAB III

NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA

3.1 Pendekatan yang Digunakan

Seperti telah dijelaskan di atas, pada umumnya sumber data yang digunakan dalam penyusunan NAD DKI Jakarta adalah neraca perusahaan, kecuali untuk sektor rumah tangga, pemerintah dan luar DKI Jakarta. Data neraca perusahaan tersebut umumnya dalam bentuk neraca akhir tahun, baik yang sudah dikonsolidasi maupun yang masih berbentuk individu. Namun begitu, dalam mengidentifikasi pos-pos neraca yang ada ternyata masih mengalami beberapa kendala. Pertama, data laporan keuangan perusahaan yang disajikan tidak serinci yang diharapkan, sehingga mengalami kesulitan pada saat mengidentifikasi pos-pos neraca ke dalam kode NAD.

Masalah yang kedua adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai kantor cabang di luar DKI Jakarta umumnya tidak dapat memisahkan transaksi-transaksi finansial yang terjadi di luar DKI Jakarta, sehingga dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan domisili kantor pusat. Konsekuensi diantarnya pendekatan ini adalah munculnya sektor otoritas moneter secara tersendiri dalam pembagian sektor NAD. Pembagian semacam ini sebenarnya tidak begitu sesuai dengan teori moneter secara umum, karena sektor otoritas moneter fungsinya tidak hanya melayani satu propinsi di Indonesia saja, tetapi mencakup seluruh wilayah Indonesia. Secara teknis jika otoritas moneter tidak dimunculkan tersendiri akibatnya banyak transaksi keuangan terutama yang berasal dari sektor bank dan bukan bank dengan otoritas moneter tidak dapat dilihat.

Sektor pemerintah pusat karena datanya masih dapat dialokasi untuk DKI Jakarta saja maka disajikan tidak lagi berdasarkan domosili, tetapi sudah benar-benar mencerminkan transaksi finansial sektor pemerintah di DKI Jakarta.

Sementara itu sektor luar DKI Jakarta, mencakup sektor luar negeri, luar daerah dan transaksi lain yang dilakukan oleh sektor-sektor yang belum tercakup ke dalam sektor-sektor lembaga keuangan dan bukan keuangan.

3.2 Kerangka NAD DKI Jakarta

Untuk menggambarkan arus finansial yang terjadi antar sektor ekonomi melalui instrumen finansial tertentu, biasanya digunakan matriks yang barisnya menggambarkan instrumen finansial dan kolomnya menunjukkan sektor (pelaku ekonomi). Setiap sektor mempunyai dua kolom, yang pertama menunjukkan perubahan harta (penggunaan dana). Penggolongan sektor dan instrumen finansial yang sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian DKI Jakarta akan dijelaskan berikut ini.

1. Pembagian Sektor

DKI Jakarta sebagai "pusat keuangan dan bisnis" nasional tercermin dari besarnya arus peredaran uang. Kuatnya arus uang tersebut antara lain disebabkan oleh sebagian besar kantor-kantor pusat lembaga keuangan dan kegiatan bisnis berskala besar berada di DKI Jakarta. Oleh karena itu ciri dari institusi ekonomi yang ada di DKI Jakarta mirip dengan ciri institusi nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka sektor-sektor yang dicakup dalam NAD DKI Jakarta sebagian besar akan mengikuti pembagian sektor nasional. Sektor-sektor tersebut dibedakan menjadi tiga sektor utama, yaitu (a) Sektor keuangan, (b) Sektor bukan keuangan dan (c) Sektor luar DKI Jakarta. Sektor keuangan adalah sektor-sektor yang tidak menghasilkan barang dan bertujuan sebagai penghubung atau perantara yang menyediakan kemudahan finansial bagi sektor bukan keuangan. Sedangkan sektor luar DKI Jakarta merupakan cerminan transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk DKI Jakarta dengan luar DKI Jakarta.

a. Sektor Keuangan

Sektor-sektor yang dicakup dalam sektor keuangan meliputi sektor otoritas moneter, sektor bank dan sektor bukan bank. Otoritas moneter (Bank Indonesia) dibentuk sebagai sektor tersendiri karena memiliki fungsi khusus yaitu menciptakan uang kartal. Sedangkan sektor bank dibedakan menjadi sektor bank pencipta uang giral (BPUG) dan sektor bank lainnya.

Dengan pembagian semacam ini dapat ditelusuri arus finansial dari lembaga pencipta uang (kartal maupun giral) ke sektor-sektor lainnya. Di samping itu dapat pula diketahui sektor mana yang mempunyai kelebihan dana dan sebaliknya. Selanjutnya sektor bank lainnya dibedakan menjadi bank tabungan dan bank perkreditan rakyat. Namun karena keterbatasan data, maka kelompok sektor BPUG dan bank lainnya belum dapat disajikan secara terpisah ke dalam sektornya masing-masing tetapi tergabung sebagai sektor bank.

Sementara itu cakupan sektor keuangan bukan bank terdiri dari sektor lembaga keuangan bukan bank (LKBB), asuransi dan lembaga keuangan lainnya. Masing-masing sektor ini mempunyai peranan yang khas. LKBB merupakan sektor yang menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat berharga, kemudian menanamkan kembali dana yang terhimpun tersebut pada perusahaan melalui penyertaan modal. Hadirnya sektor ini merupakan alternatif yang baik bagi sektor bisnis dan rumah tangga untuk menyalurkan atau mencari sumber pembelanjaan jangka panjang. Jenis tipe lembaga ini dirinci menjadi tipe pembangunan, investasi, dan pembelanjaan perumahan.

Sejalan dengan kemajuan pembangunan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, maka sektor asuransi memiliki volume usaha yang semakin besar. Oleh karena itu pembentukan sektor asuransi juga seharusnya dicakup dalam NAD tetapi karena keterbatasan data yang tersedia, sektor ini masih bergabung dalam sektor bukan bank. Ada empat jenis kegiatan asuransi yaitu reasuransi, asuransi jiwa yang masing-masing dibedakan lagi milik pemerintah dan swasta. Khusus asuransi sosial hanya dimiliki oleh pemerintah.

Selanjutnya yang termasuk dalam sektor lembaga keuangan lainnya terdiri dari perusahaan lembaga pembiayaan, pegadaian dan dana pensiun. Dibandingkan dengan sektor bank dan asuransi peranan sektor lembaga keuangan lainnya jauh lebih rendah, walaupun begitu menunjukkan perkembangan yang cukup mengesankan. Untuk memudahkan penyusunan NAD, sektor ini dikelompokkan ke dalam sektor bukan bank.

b. Sektor Bukan Keuangan

Sektor bukan keuangan adalah sektor-sektor yang bergerak di sektor real, yaitu sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa. Adapun cakupan dalam sektor ini meliputi, sektor pemerintah, perusahaan pemerintah (BUMN dan BUMD), bisnis (perusahaan swasta dan koperasi), dan rumah tangga. Ketiga sektor ini disajikan secara tersendiri dalam NAD.

c. Sektor luar DKI Jakarta

Sektor ini secara eksplisit dapat menggambarkan karakteristik hutang-piutang penduduk DKI Jakarta dengan luar DKI Jakarta baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan uraian pembagian sektor di atas, seharusnya terdapat 28 sektor yang dicakup dalam NAD DKI Jakarta. Dari 28 sektor tersebut 20 sektor di antaranya merupakan sektor keuangan, dan hanya 7 sektor bukan keuangan serta 1 sektor luar DKI Jakarta. Tetapi karena keterbatasan data, NAD DKI Jakarta hanya disajikan sebanyak 8 sektor agregat. Adapun definisi untuk masing-masing sektor dapat dilihat pada Lampiran 1.

Untuk memudahkan gambaran mengenai pembagian sektor dalam NAD DKI Jakarta, dapat dilihat pada uraian berikut ini:

I. SEKTOR KEUANGAN

1. Otoritas Moneter

2. Bank

a. Bank Pencipta Uang Giral (BPUG)

- Bank Umum (Pemerintah, Swasta, Asing)
- Bank Pembangunan

b. Bank lain

- Bank Tabungan
- Bank Perkreditan Rakyat

3. Bukan Bank

a. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

- Tipe Pembangunan
- Tipe Investasi
- Tipe Pembelanjaan Perumahan

b. Asuransi

- Reasuransi (Pemerintah dan Swasta)
- Asuransi kerugian (Pemerintah dan Swasta)
- Asuransi Jiwa (Pemerintah dan Swasta)
- Asuransi Sosial (Pemerintah)

c. LKBB Lainnya

- Lembaga Pembiayaan
- Pegadaian
- Dana Pensiun

II. SEKTOR BUKAN KEUANGAN

4. Rumah Tangga

5. Pemerintah (Pusat dan Daerah)

6. Perusahaan Pemerintah

- BUMN
- BUMD

7. Bisnis

- Perusahaan Swasta Nonfinansial
- Koperasi

III. SEKTOR LUAR DKI JAKARTA

8. Luar DKI Jakarta

2. Pembagian Kategori

Pada dasarnya kategori transaksi dalam NAD dikelompokkan ke dalam kelompok bagian atas dan bagian bawah. Kelompok bagian atas NAD berisi transaksi nonfinansial (investasi real/pembentukan modal) dan kelompok bagian bawah berisi transaksi finansial. Transaksi nonfinansial terdiri dari tabungan bruto dan perolehan harta nonfinansial. Tabungan bruto terdiri dari penyusutan barang modal dan tabungan

neto. Sedangkan perolehan harta nonfinansial berisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan stok, dan pembelian barang modal bekas dan harta tak berwujud netto (PBHTN). Kesemua rincian tersebut diperoleh dari neraca modal regional yang merupakan jembatan menuju ke bagian bawah NAD (transaksi finansial).

Sebelum masuk ke bagian finansial, untuk kepentingan pengecekan konsistensi, diperkenalkan beberapa baris pembantu. Pertama, pinjaman netto yang merupakan selisih antara tabungan bruto dan investasi nonfinansial. Akan tetapi karena matriks NAD disajikan menurut sektor, maka selalu terjadi perbedaan antara nilai tabungan dan investasi real. Jika angka pada baris ini positif berarti sektor yang bersangkutan mengalami kelebihan dana atau disebut sektor surplus, sebaliknya jika negatif disebut sektor defisit. Matriks NAD dapat digunakan menelusuri aliran dana dari sektor surplus ke sektor defisit melalui berbagai instrumen finansial yang nantinya digambarkan pada bagian bawah.

Sebenarnya angka pinjaman netto dapat pula dihitung berdasarkan selisih jumlah penggunaan finansial dengan sumber finansial. Logikanya per definisi pinjaman netto adalah bagian investasi finansial, begitu pula selisih jumlah penggunaan dan sumber juga akan merupakan investasi finansial, tetapi diperoleh dari mutasi/transaksi finansial. Apabila selisih angka ini negatif berarti jumlah sumber finansial lebih besar dari jumlah penggunaannya, sebaliknya jika selisih tersebut positif menunjukkan jumlah penggunaan lebih besar dari sumber. Perbedaan kedua pendekatan ini dimunculkan dalam baris selisih statistik.

Dengan demikian terdapat lima baris penunjang, yaitu pinjaman neto, selisih statistik, investasi finansial neto, jumlah penggunaan finansial, dan jumlah sumber finansial.

NAD idealnya menampung seluruh jenis instrumen finansial yang dipakai oleh masing-masing sektor dalam perekonomian DKI Jakarta. Kalau pendekatan ini ditempuh maka daftar instrumen akan menjadi sangat panjang, sehingga sulit untuk memahami dan mengambil kesimpulan dari daftar ini. Untuk itu dilakukan penggolongan jenis instrumen yang sejenis atau mempunyai sifat-sifat hampir sama, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen khas yang dimiliki oleh sektor tertentu. Misalnya cadangan asuransi dan dana pensiun dimunculkan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan sektor asuransi dan dana pensiun.

Berdasarkan penggolongan tersebut, maka secara garis besar kategori transaksi NAD DKI Jakarta dibedakan menjadi: (a) cadangan valuta asing pemerintah, (b) Klaim dalam valuta asing lainnya, (c) uang dan simpanan, (d) surat berharga jangka pendek, (e) pinjaman, (f) modal (equity), surat berharga jangka panjang, dan (g) lainnya. Di bawah ini dijelaskan rincian masing-masing kategori transaksi dalam kelompok besar di atas.

Cadangan valuta asing pemerintah menggambarkan hubungan antara sektor otoritas moneter dengan sektor luar DKI Jakarta khususnya luar negeri. Kategori ini akan mencakup transaksi emas moneter, SDR, posisi cadangan di IMF, cadangan valuta asing, dan lainnya. Di samping sektor otoritas moneter, sektor-sektor lainnya dapat pula secara langsung melakukan hubungan dengan sektor di luar DKI Jakarta khususnya luar negeri. Oleh karena itu, untuk menampung transaksi yang demikian dimunculkan kategori klaim dalam valuta asing lainnya.

Instrumen finansial yang dicakup dalam kategori uang dan simpanan sebagian besar berkaitan dengan hutang bank terhadap sektor lainnya. Karena uang dan simpanan sektor lainnya di sektor bank dapat berbentuk valuta asing dan rupiah, maka dimunculkan kategori uang dan simpanan dalam valuta asing dan rupiah secara terpisah. Masing-masing kategori ini dirinci lagi ke dalam uang kertas dan logam, giro, tabungan dan deposito berjangka. Di samping jenis tabungan tersebut, dimunculkan pula jenis tabungan lainnya yang mencakup tabungan giro pos dan koperasi untuk menampung simpanan yang dilakukan di kantor pos dan koperasi.

Surat berharga jangka pendek umumnya diberikan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank. Jenis instrumen ini sebenarnya merupakan satu alternatif lain dalam investasi finansial. Di lain pihak, otoritas moneter kadang-kadang menggunakan instrumen ini (SBI) untuk melaksanakan kebijaksanaan moneternya.

Pinjaman merupakan hutang pada bank dan institusi lain. Dalam praktek, terdapat kecenderungan bahwa sektor keuangan nonbank juga ikut mengambil alih sebagian peranan bank dalam pemberian pinjaman. Kredit atau pinjaman yang diberikan dapat berbentuk rupiah atau valuta asing. Oleh sebab itu dalam NAD di bawah kategori ini dimunculkan instrumen kredit bank dalam rupiah, pinjaman institusi lain dalam rupiah, serta pinjaman dalam valuta asing. Karena sifat kredit yang diberikan ini mempunyai fungsi yang berlainan, maka kredit yang berasal baik dari bank maupun institusi lain dipecah menjadi kredit modal kerja, kredit investasi dan konsumsi. Sedangkan semua kredit yang diberikan dalam valuta asing baik oleh bank maupun institusi lainnya, dimasukkan dalam satu kategori pinjaman dalam valuta

asing.

Setiap sektor untuk menjalankan kegiatannya sudah tentu mempunyai modal atau equity. Untuk kegiatan yang sudah berjalan masih memungkinkan penambahan modal. Ada berbagai cara untuk mendapatkannya, antara lain dimodali sendiri, bekerja sama dengan orang atau dengan menjual saham (tanda ikut memiliki). Dengan berkembangnya pasar modal, maka akhir-akhir ini banyak pula perusahaan yang menjual sahamnya melalui pasar modal (go-public). Bagi investor pembelian saham sejenis ini merupakan satu alternatif di luar simpanan bank dan surat berharga jangka pendek.

Surat berharga jangka panjang umumnya diterbitkan oleh ~~sektor pemerintah, lembaga keuangan dan sektor lain~~ yang memerlukan dana investasi jangka panjang. Untuk saat ini rincian kategori tersebut berupa obligasi pemerintah dan obligasi lainnya baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Kelompok kategori yang terakhir merupakan kategori khusus untuk sektor-sektor tertentu. Seperti cadangan asuransi dan pensiun, untuk sektor asuransi dan yayasan dana pensiun, dan dana perwalian yang direncanakan untuk menampung investasi yang dilakukan masyarakat ke dalam "trust company". Nampaknya investasi ke perusahaan semacam ini masih belum berkembang di DKI Jakarta. Kemudian untuk menampung hutang-hutang dagang yang sering terjadi di dunia usaha dimunculkan kategori kredit dagang. Selanjutnya kategori klaim antar bank dibuat khusus untuk transaksi yang terjadi antar bank, baik antar BPUG dengan Bank Indonesia maupun transaksi antar BPUG.

Selain kategori transaksi di atas, dibuat pula kategori

rupa-rupa yang menampung semua transaksi yang tidak tercakup dalam kategori yang telah disebut terdahulu. Definisi kategori transaksi diberikan secara lengkap di Lampiran 2.

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB IV

ANALISA DESKRIPTIF NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA

Pada bab ini dibahas tentang perkembangan beberapa variabel penting dari Neraca Arus Dana (NAD) DKI Jakarta berdasarkan cakupan data tahun 1991-1992.

4.1 Peranan Lembaga Keuangan di DKI Jakarta terhadap Nasional

Dilihat dari luas wilayahnya, DKI Jakarta merupakan propinsi dengan luas wilayah terkecil dibanding dengan 26 propinsi lain di Indonesia. Namun sebagai Ibukota negara dan pusat pemerintahan perekonomiannya telah tumbuh dengan pesat. Pada tahun 1990 pertumbuhan perekonomiannya mencapai 9,84 persen dan pada tahun 1992 sebesar 8,09 persen, lebih tinggi dari angka nasional yang pada periode tersebut mencapai 7,24 dan 6,95 persen (Tabel 4.1). Sedangkan nilai Produk Domestik Regional Bruto-nya (PDRB) mencapai sekitar 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang demikian pesat di DKI Jakarta berkaitan dengan permintaan regional yang menguat dan akhirnya terjadi peningkatan kebutuhan dana investasi dalam rangka menciptakan nilai tambah, baik melalui pinjaman dalam maupun luar negeri. Minat investor domestik maupun asing untuk melakukan investasi di wilayah DKI Jakarta masih tinggi seperti tercermin pada persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 1990, 1991 dan 1992 besarnya PMDN yang disetujui 3 272 miliar, 3 604 miliar dan 4 002 milyar rupiah. Bila dibandingkan dengan PMDN yang disetujui di

Indonesia persentasenya sebesar 5, 9 dan 14 persen. Sedangkan PMA pada periode yang sama sebesar 1 652 juta; 4 217 juta dan 1 131 juta dolar Amerika. Persentasenya dari seluruh PMA di Indonesia berturut-turut 18 persen; 48 persen dan 11 persen.

Proses pembiayaan investasi dalam pelaksanaannya memerlukan lembaga keuangan sebagai perantara yang menghubungkan penyedia dana (sektor surplus) dengan sektor yang membutuhkan dana (sektor defisit). Dengan demikian dalam suatu perekonomian yang maju, hampir dipastikan bahwa peran sektor lembaga keuangan juga berkembang. Di DKI Jakarta, sektor lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, merupakan salah satu sektor utama yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tabel 4.1 terlihat bahwa nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga konstan 1983 pada tahun 1990, 1991 dan 1992 sekitar 2 000 miliar, atau sekitar 36 sampai 38 persen dari NTB nasional.

Besar kecilnya kegiatan perbankan dapat dilihat dari nilai aktiva yang dimiliki perbankan, yang terdiri dari Kas, Giro dan tagihan. Pada tahun 1990/1991 aktiva bank seluruh DKI Jakarta sebesar 112 918 miliar rupiah atau 85 persen dari jumlah aktiva Bank seluruh Indonesia, pada tahun 1991/1992 dan 1992/1993 jumlahnya semakin meningkat menjadi 137 609 dan 173 034 miliar rupiah, atau 90 dan 92 persen dari seluruh aktiva bank di Indonesia. Dilihat dari posisi kredit, jumlah kredit perbankan Jakarta yang disalurkan pada tahun 1992 sebesar 71 152 miliar rupiah, atau sekitar 58 persen dari posisi kredit perbankan nasional. Demikian juga pada dua tahun sebelumnya, posisi kreditnya sekitar 55 sampai 56 persen dari posisi nasional. Dana yang dihimpun perbankan nasional sebagian besar berada pada

Indonesia persentasenya sebesar 5, 9 dan 14 persen. Sedangkan PMA pada periode yang sama sebesar 1 652 juta; 4 217 juta dan 1 131 juta dolar Amerika. Persentasenya dari seluruh PMA di Indonesia berturut-turut 18 persen; 48 persen dan 11 persen.

Proses pembiayaan investasi dalam pelaksanaannya memerlukan lembaga keuangan sebagai perantara yang menghubungkan penyedia dana (sektor surplus) dengan sektor yang membutuhkan dana (sektor defisit). Dengan demikian dalam suatu perekonomian yang maju, hampir dipastikan bahwa peran sektor lembaga keuangan juga berkembang. Di DKI Jakarta, sektor lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, merupakan salah satu sektor utama yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tabel 4.1 terlihat bahwa nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga konstan 1983 pada tahun 1990, 1991 dan 1992 sekitar 2 000 miliar, atau sekitar 36 sampai 38 persen dari NTB nasional.

Besar kecilnya kegiatan perbankan dapat dilihat dari nilai aktiva yang dimiliki perbankan, yang terdiri dari Kas, Giro dan tagihan. Pada tahun 1990/1991 aktiva bank seluruh DKI Jakarta sebesar 112 918 miliar rupiah atau 85 persen dari jumlah aktiva Bank seluruh Indonesia, pada tahun 1991/1992 dan 1992/1993 jumlahnya semakin meningkat menjadi 137 609 dan 173 034 miliar rupiah, atau 90 dan 92 persen dari seluruh aktiva bank di Indonesia. Dilihat dari posisi kredit, jumlah kredit perbankan Jakarta yang disalurkan pada tahun 1992 sebesar 71 152 miliar rupiah, atau sekitar 58 persen dari posisi kredit perbankan nasional. Demikian juga pada dua tahun sebelumnya, posisi kreditnya sekitar 55 sampai 56 persen dari posisi nasional. Dana yang dihimpun perbankan nasional sebagian besar berada pada

perbankan DKI Jakarta yaitu 56 032 miliar rupiah pada tahun 1990, atau sekitar 67 persen dari seluruh dana perbankan nasional. Sedangkan pada tahun 1991 dan 1992 mencapai sekitar 62 persen, yaitu masing-masing 59 291 miliar dan 71 489 miliar rupiah.

Lembaga keuangan lain, seperti asuransi , Dana Pensiun dan Lembaga pembiayaan sebagian besar juga berada di Jakarta ini. Jumlah perusahaan asuransi di Jakarta pada tahun 1990 sebanyak 113 perusahaan dengan jumlah aktiva 6 203 miliar rupiah, pada tahun 1991 terdapat 132 perusahaan dengan aktiva 7 848 miliar rupiah dan tahun 1992 menjadi 137 perusahaan dengan aktiva sebesar 8 994 miliar rupiah. Dibandingkan dengan nasional, jumlah aktiva selama periode tersebut setiap tahun sekitar 99 persen.

Jumlah perusahaan Dana Pensiun di Indonesia pada tahun 1990 sebanyak 161 perusahaan, 127 perusahaan berada di Jakarta dengan jumlah aktiva 2 693 miliar rupiah, atau sekitar 79 persen dari aktiva dana pensiun nasional. Pada tahun 1991 dan 1992 jumlah perusahaan di Jakarta menjadi 146 dan 148 perusahaan dengan jumlah aktiva masing-masing 4 000 dan 5 518 miliar rupiah, atau sekitar 76 dan 75 persen aktiva perusahaan se Indonesia. Demikian juga dengan perusahaan Lembaga pembiayaan, pada tahun 1990 jumlah perusahaannya 115 perusahaan, tahun 1991 sebanyak 140 perusahaan dan 147 perusahaan pada tahun 1992, sedangkan di Indonesia pada tahun tersebut masing-masing 159, 184 dan 191 perusahaan. Jumlah aktivanya pada tahun 1990 sebesar 5 018 miliar rupiah, atau sekitar 72 persen aktiva perusahaan tersebut se-Indonesia. Pada tahun 1991 dan 1992 aktivanya mencapai 7 384 dan 7 695 miliar rupiah, atau sekitar 76 dan 77 persen aktiva lembaga pembiayaan nasional.

Tabel 4.1. Beberapa Indikator Ekonomi dari Keuangan DKI Jakarta dan Indonesia

INDIKATOR	1990		1991		1992	
	DKI Jakarta	Indonesia	DKI Jakarta	Indonesia	DKI Jakarta	Indonesia
1. Pertumbuhan Ekonomi	9,84	7,24	8,59	6,95	8,09	6,46
2. Nilai Tambah Bruto Bank & Lembaga Keuangan Lain atas Dasar Harga 1983 (Miliar rupiah)	1,882	4,894	1,996	5,535	2,232	6,256
3. Penanaman Modal Asing (PMA) yang disetujui (juta US\$)	1,652	8,750	4,217	8,778	1,131	10,340
4. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang disetujui (Miliar rupiah)	3,272	59,878	3,604	41,078	4,002	29,342
5. Jumlah Aktiva Bank (Miliar Rupiah) 1)	112,918	134,659	137,609	157,076	173,034	187,411
6. Posisi Kredit Perbankan dalam Valas dan Rupiah (Miliar Rupiah)	41,135 2)	85,145 2)	63,422	112,825	71,152	122,918
7. Penghimpunan Dana dalam Valas dan Rupiah (Miliar Rupiah)	56,032	83,154	59,291	95,118	71,489	114,850
8. Jumlah Aktiva Perusahaan Asuransi (Miliar Rupiah)	6,203	6,242	7,848	7,872	8,994	9,017
Jumlah Perusahaan Asuransi	113	126	132	138	137	143
9. Jumlah Aktiva Perusahaan Dana Pensiun (Miliar Rupiah)	2,693	3,414	4,000	5,288	5,518	7,345
Jumlah Perusahaan Dana Pensiun	127	161	146	193	148	197
10. Jumlah Aktiva Perusahaan Lembaga Pembiayaan (Miliar Rupiah)	5,018	6,938	7,384	9,705	7,695	9,998
Jumlah Perusahaan Lembaga Pembiayaan	115	159	140	184	147	191

Catatan :

1) Menurut tahun anggaran 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993

2) Tidak termasuk Valas

4.2 Neraca Pembiayaan Modal Sektoral

Dalam Neraca Arus Dana, setiap sektor memiliki seperangkat sumber dan penggunaan dana yang dibentuk oleh adanya pembelian dan penjualan berbagai jenis instrumen finansial. Dari neraca pembiayaan modal sektoral dapat dilihat berbagai sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi yang dilakukan oleh setiap sektor dalam perekonomian. Selanjutnya pada Tabel 4.2.1 , 4.2.2, 4.2.3 dan 4.2.4 masing-masing disajikan struktur pembentukan tabungan bruto (tabungan netto ditambah penyusutan barang modal) menurut sektor-sektor Neraca Arus Dana dan struktur pembentukan modal atau perolehan harta non finansial yang terdiri dari pembentukan modal tetap bruto ditambah kenaikan stok. Sedangkan pada Tabel 4.2.5 disajikan struktur pembentukan pinjaman netto, yang merupakan selisih antara tabungan bruto dan perolehan harta non finansial, menurut sektor Neraca Arus Dana. Pola dan perkembangan dari ketiga variabel tersebut berdasarkan data tahun 1991 - 1992, diuraikan secara garis besar berikut ini.

**TABEL 4.2.1. STRUKTUR TABUNGAN BRUTO SEKTORAL TERHADAP
TOTAL TABUNGAN BRUTO TAHUN 1991-1992**

S E K T O R	1991	1992
A. Non Finansial	67,54	85,30
1. Pemerintah	16,94	13,29
2. Perusahaan		
- Pemerintah	11,07	13,10
- Swasta	15,11	28,70
3. Rumahtangga	24,42	30,21
B. Finansial	32,46	8,06
1. Bank	19,25	6,31
2. Bukan Bank	13,21	1,75
C. Luar DKI Jakarta	-	6,63
J U M L A H	100,00	100,00
JUMLAH TABUNGAN BRUTO (MILIAR Rp)	14.318	16.988

Dari Tabel 4.2.1 tampak bahwa peranan sektor pemerintah terhadap jumlah tabungan bruto menurun dari 16,94 persen pada tahun 1991 menjadi 13,29 persen pada tahun 1992. Di lain pihak sektor perusahaan pemerintah (BUMD dan BUMN) menunjukkan peningkatan dari 11,07 persen pada tahun 1991 menjadi 13,10 persen pada tahun 1992. Keadaan ini juga dialami oleh sektor rumah tangga yaitu dari 24,42 persen pada tahun 1991 menjadi 30,21 persen. Kenaikan yang cukup tajam dialami oleh sektor perusahaan swasta (bisnis) yaitu dari 15,11 persen pada tahun 1991 menjadi 28,70 persen pada tahun 1992 atau sekitar 13 persen lebih. Sedangkan pada sektor finansial baik bank maupun bukan bank mengalami penurunan yang cukup berarti yaitu dari 19,25

persen pada tahun 1991 menjadi 6,31 pada tahun 1992 untuk bank, dan 13,21 persen pada tahun 1991 menjadi 1,75 persen pada tahun 1992 untuk sektor bukan bank. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1991-1992 terjadi pergeseran peranan antar sektor dalam pembentukan tabungan bruto. Pada sektor finansial yang terdiri dari Otoritas Moneter, Bank dan Bukan Bank semuanya mengalami penurunan sedangkan semua sektor non finansial yang terdiri dari Pemerintah, Perusahaan pemerintah dan swasta serta sektor rumah tangga mengalami kenaikan sehingga peranan sektor-sektor non finansial terhadap jumlah tabungan bruto pada tahun 1992 semakin besar yaitu sebesar 85 persen lebih.

TABEL 4.2.2. STRUKTUR TABUNGAN BRUTO SEKTORAL TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, 1991-1992

S E K T O R	1991	1992
A. Non Finansial	25,79	33,46
1. Pemerintah	6,47	5,21
2. Perusahaan		
- Pemerintah	4,23	5,14
- Swasta	5,77	11,26
3. Rumahtangga	9,32	11,85
B. Finansial	12,33	3,16
1. Bank	7,29	2,47
2. Bukan Bank	5,04	0,69
C. Luar DKI Jakarta	-	2,60
J U M L A H	38,12	39,22
PDRB (MILIAR Rp)	37.507	43.322

Jika perubahan struktur tabungan bruto diukur dalam nilai persentase terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara rata-rata dalam kurun waktu 1991 - 1992 tabungan sektor rumah tangga merupakan yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Seperti tampak pada Tabel 4.2.2 rasio tabungan sektor ini terhadap PDRB DKI Jakarta naik dari 9,32 persen pada tahun 1991 menjadi 11,85 persen pada tahun 1992. Pola yang sama terjadi pula pada sektor-sektor nonfinansial kecuali sektor pemerintah. Tetapi pada sektor finansial terjadi penurunan cukup tajam dari 12,33 persen pada tahun 1991 menjadi 3,16 persen pada tahun 1992. Secara total, rasio tabungan bruto terhadap PDRB DKI Jakarta naik yaitu dari 38,12 persen pada tahun 1991 menjadi 39,22 persen pada tahun 1992.

4.2.2 Struktur Perolehan Harta Nonfinansial

Berdasarkan Tabel 4.2.3 dapat dilihat bahwa peranan sektor pemerintah selama kurun waktu 1991 - 1992 tidak mengalami perubahan yang berarti yaitu dari 13,04 persen pada tahun 1991 menjadi 13,64 persen pada tahun 1992. Di pihak lain sektor perusahaan pemerintah mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu dari 40,47 persen pada tahun 1991 menjadi 27,16 persen pada tahun 1992. Sebaliknya sektor perusahaan swasta mengalami peningkatan dari 21,57 persen menjadi 34,91 persen. Pola serupa dialami pula oleh sektor rumahtangga yaitu dari 13,28 persen menjadi 15,76 persen. Sedangkan pada sektor finansialnya secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 3,12 persen sebagai akibat penurunan pada sektor Bank walaupun sektor bukan Banknya relatif tetap.

**TABEL 4.2.4 STRUKTUR PEROLEHAN HARTA NON FINANSIAL SEKTORAL
TERHADAP PEROLEHAN HARTA FINANSIAL 1991-1992**

S E K T O R	1991	1992
A. Non Finansial	88,36	91,47
1. Pemerintah	13,04	13,64
2. Perusahaan		
- Pemerintah	40,47	27,16
- Swasta	21,57	34,91
3. Rumah tangga	13,28	15,76
B. Finansial	11,65	8,53
1. Bank	8,59	5,47
2. Bukan Bank	3,06	3,06
C. Luar DKI Jakarta	-	-
J U M L A H	100,00	100,00
PEROLEHAN HARTA FINANSIAL (MILIAR Rp)	14.318	16.988

Pola dan perkembangan yang sama juga terlihat apabila perolehan harta nonfinansial sektor-sektor yang dicakup dalam NAD dihitung persentasenya terhadap PDRB DKI Jakarta. Pada Tabel 4.2.4 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan persentase perolehan harta nonfinansial terhadap PDRB naik dari 38,18 persen pada tahun 1991 menjadi 39,21 persen pada tahun 1992. Peranan sektor-sektor nonfinansial cenderung mengalami peningkatan, sedangkan peranan sektor-sektor finansialnya cenderung menurun.

**TABEL 4.2.4. STRUKTUR PEROLEHAN HARTA NON FINANSIAL SEKTORAL
TERHADAP PDRB 1991 - 1992**

S E K T O R	1991	1992
A. Non Finansial	33,73	35,87
1. Pemerintah	4,98	5,35
2. Perusahaan		
- Pemerintah	15,45	10,65
- Swasta	8,23	13,69
3. Rumah tangga	5,07	6,18
B. Finansial	4,45	3,34
1. Bank	3,28	2,14
2. Bukan Bank	1,17	1,20
C. Luar DKI Jakarta	-	-
J U M L A H	38,18	39,21
PDRB (MILIAR Rp)	37.507	43.322

4.2.3 Struktur Pinjaman Neto

Pinjaman neto merupakan selisih antara tabungan bruto dengan perolehan harta nonfinansial. Menurut definisi, jumlah pinjaman neto dari semua sektor (termasuk luar DKI Jakarta) akan sama dengan nol, sebab hutang pada suatu sektor akan merupakan piutang di sektor lainnya. Dengan demikian tidaklah tepat untuk membahas persentase pinjaman neto dari masing-masing sektor terhadap total pinjaman neto. Pada Tabel 4.2.5 disajikan persentase pinjaman neto dari masing-masing sektor terhadap PDRB.

**TABEL 4.2.5. STRUKTUR PINJAMAN NETO SEKTORAL TERHADAP PDRB
TAHUN 1991 - 1992**

S E K T O R	1991	1992
A. Non Finansial	- 7,94	- 2,41
1. Pemerintah	1,49	- 0,14
2. Perusahaan		
- Pemerintah	- 11,22	- 5,51
- Swasta	- 2,46	- 2,43
3. Rumah tangga	4,25	5,67
B. Finansial	7,94	- 0,18
1. Bank	4,07	0,33
2. Bukan Bank	3,87	- 0,51
C. Luar DKI Jakarta	-	2,60
J U M L A H	0	0,01
PDRB (MILIAR Rp)	37.507	43.322

Dari Tabel 4.2.5 tampak bahwa pada sektor perusahaan pemerintah maupun swasta memiliki pinjaman neto negatif selama kurun waktu 1991-1992 artinya jumlah tabungan lebih kecil dibandingkan investasi realnya. Namun demikian, pinjaman neto sektor perusahaan pemerintah dan swasta ini menunjukkan peningkatan yaitu masing-masing dari -11,22 persen dan -2,46 persen pada tahun 1991 menjadi -5,51 persen dan -2,43 persen pada tahun 1992. Sementara itu sektor pemerintah mengalami penurunan yang cukup berarti yaitu dari 1,49 persen pada tahun 1991 menjadi -0,14 persen pada tahun 1992. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada

tahun 1991 sektor pemerintah berperan sebagai sektor pemberi pinjaman atau memiliki tabungan lebih besar dari investasi realnya sedangkan pada tahun 1992 berperan sebagai penerima pinjaman karena investasi realnya lebih besar dari tabungan bruto. Pola yang hampir sama juga dialami oleh sektor finansial yang meliputi otoritas moneter, bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bahkan penurunan untuk sektor bukan bank sampai menjadi negatif pada tahun 1992. Satu-satunya sektor yang mengalami peningkatan dan angkanya positif adalah sektor rumah tangga yaitu dari 6,05 persen pada tahun 1991 menjadi 7,93 persen pada tahun 1992.

4.3 Celah Investasi dan tabungan

Setiap sektor dalam Neraca Arus Dana (NAD) dapat menggambarkan bagaimana tabungan dihubungkan dengan sektor-sektor surplus dan sektor-sektor defisit. Tabel 4.3 akan menyajikan struktur investasi dari masing-masing sektor dalam NAD dihubungkan dengan struktur tabungan brutonya.

**TABEL 4.3 STRUKTUR INVESTASI DAN TABUNGAN BRUTO SEKTORAL
TAHUN 1991-1992**

S E K T O R	1991			1992		
	Inves tasi	Tabung an	Pinjam an neto	Inves tasi	Tabung an	Pinjam an neto
A. Non Finansial						
1. Pemerintah	1 867	2 426	559	2 318	2 258	(60)
2. Perusahaan						
- Pemerintah	5 795	1 585	(4 210)	4 614	2 226	(2 388)
- Swasta	3 088	2 164	(924)	5 930	4 876	(1 054)
3. Rumah tangga	1 902	3 496	1 594	2 677	5 132	2 455
B. Finansial						
1. Bank	1 230	2 736	1 526	929	1 072	143
2. Bukan Bank	438	1 891	1 455	520	298	(222)
C. Luar DKI Jakarta	-	-	-	-	1 126	1 126
JUMLAH (miliar Rp)	14 318	14 318	0	16 988	16 988	0

Berdasarkan Tabel 4.3 sektor pemerintah pada tahun 1991 mempunyai selisih antara tabungan dengan investasi yang positif sebesar 559 miliar rupiah. Hal ini berarti bahwa sektor pemerintah mampu membiayai investasinya sendiri bahkan masih mempunyai surplus sehingga bisa berperan untuk memberikan pinjaman kepada sektor lainnya yang mengalami defisit. Pada tahun 1992 investasi pada sektor ini mengalami peningkatan menjadi 2 318 miliar rupiah, sedangkan tabungan brutonya menurun hingga menjadi 2 258 miliar rupiah. Hal ini menyebabkan sektor pemerintah mengalami defisit dan mencari pinjaman kepada sektor yang surplus untuk memenuhi kebutuhan investasinya. Pola yang

hampir sama dialami oleh sektor finansial (Bank dan Bukan Bank). Pada sektor bank (termasuk Otoritas Moneter) selama kurun waktu 1991-1992 mengalami penurunan pada struktur pinjaman neto yaitu dari 1 526 miliar rupiah pada tahun 1991 menjadi 143 miliar rupiah pada tahun 1992. Namun demikian angka itu masih menunjukkan positif sehingga sektor bank ini masih mampu berperan untuk menyalurkan kelebihan dananya kepada sektor lain yang membutuhkan. Sedangkan pada sektor lembaga keuangan bukan bank pada tahun 1991 masih memiliki surplus tabungan di atas investasinya sebesar 1 455 miliar rupiah tetapi pada tahun berikutnya sektor ini mengalami defisit sebesar 222 miliar rupiah.

Sementara itu sektor dunia usaha, baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta sesuai dengan fungsinya sebagai sektor pencipta produk berupa barang ataupun jasa, memerlukan investasi yang sangat besar. Seperti terlihat pada tabel 4.6 sektor perusahaan pemerintah pada tahun 1991 kebutuhan investasinya sebesar 5 795 miliar rupiah sedangkan tabungan bruto hanya tersedia sebesar 1 585 miliar rupiah sehingga sektor ini mengalami defisit sebesar 4 210 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 1992 investasi sebesar 4 614 miliar rupiah yang sebagian dibiayai dengan tabungan sebesar 2 226 miliar rupiah sehingga kekurangan dana sebesar 2 388 miliar rupiah harus menyerap dana dari sektor lain yang surplus. Tidak berbeda dengan perusahaan pemerintah, perusahaan swasta pada tahun 1991 mengalami defisit sebesar 924 miliar rupiah, kemudian pada tahun 1992 kekurangan dana itu meningkat hingga mencapai 1 054 miliar rupiah.

Sektor rumah tangga sebagai sektor yang surplus dana dapat menginvestasikan kelebihan dana tersebut pada sektor-sektor lain yang mengalami defisit. Pada tahun 1991 sektor rumah tangga mempunyai surplus dana sebesar 1 594 miliar rupiah sedangkan pada tahun 1992 meningkat menjadi 2 455 miliar rupiah. Ada satu hal penting dari tabel 4.3 bahwa pada tahun 1991 kebutuhan investasi di DKI Jakarta bisa dipenuhi dari dalam DKI Jakarta sendiri, sedangkan pada tahun 1992 keadaan ini berubah karena surplus dana yang ada di DKI Jakarta tidak mampu untuk menutup kebutuhan investasi yang ada sehingga diperlukan partisipasi dari sektor-sektor luar DKI Jakarta yaitu sebesar 1 126 miliar.

Berdasarkan uraian diatas tampak bahwa ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara sektor yang surplus dengan sektor yang defisit. Di satu pihak sektor surplus dapat memanfaatkan kelebihan dananya untuk investasi sehingga bisa mendapatkan nilai tambah dari dana yang diinvestasikan tersebut. Di pihak yang defisit dapat memenuhi kebutuhan investasinya dengan menyerap dana dari sektor yang surplus.

4.4 Keterkaitan Finansial Antar Sektor

Pada sub bab ini pembahasan dikonsentrasikan pada tabel Ringkasan Tabel Neraca Arus Dana DKI Jakarta, 1992. Sub bab ini hanya menguraikan keterkaitan transaksi arus finansial dari suatu sektor ke sektor lainnya.

- Cadangan Valas Pemerintah

Pada tahun 1992 cadangan valas pemerintah seperti emas moneter, SDR, deposito dan surat berharga yang dimiliki otoritas moneter bertambah sebesar Rp 9 379 miliar. Dari

sejumlah cadangan tersebut, seluruhnya digunakan oleh sektor otoritas moneter, ini berarti otoritas moneter menggunakan cadangan valasnya sebesar 100 persen atau Rp 9 379 miliar dari sektor luar negeri.

- **Klaim dalam Valas Lainnya**

Bank merupakan sektor yang melakukan transaksi dalam bentuk klaim dalam valas lainnya. Pada tahun 1992 sektor ini melakukan transaksi dari sisi penggunaan sebesar Rp 2 428 miliar, sedangkan total dari transaksi ini hanya sebesar Rp 5 0 transaksi. Sebaliknya sektor ini merupakan sektor yang paling banyak diklaim oleh sektor-sektor lain, yaitu sebesar Rp 1 719 miliar dari seluruh total transaksi.

- **Uang dan Simpanan dalam Valas**

Sektor bank dan sektor pemerintah merupakan pengguna dana terbesar dalam bentuk transaksi ini, yaitu masing-masing sebesar Rp 2 388 miliar dan Rp 1 414 miliar, kemudian disusul oleh sektor lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp 433 miliar. Sedangkan total seluruh sektor dari transaksi ini sebesar Rp 3 974 miliar.

Uang Kertas dan Logam

Secara keseluruhan jenis transaksi ini hanya mencapai Rp 2 238 miliar. Secara rinci sektor yang menggunakan uang kertas dan logam ini, antara lain rumah tangga (Rp 702 miliar), perusahaan swasta (Rp 104 miliar), perusahaan pemerintah (Rp 524 miliar) dan sektor luar DKI Jakarta (Rp 776 miliar) atau sebesar 35 persen.

G i r o

Pada tahun 1992 sebesar Rp 6 208 miliar tercatat dalam rekening giro. Dari sejumlah tersebut terdapat tiga sektor yang mempunyai rekening giro terbesar, yaitu perusahaan pemerintah Rp 3 717 (59,87 persen), rumah tangga Rp 896 miliar (14,43 persen) dan pemerintah Rp 515 miliar (8,30 persen). Sisa giro sebesar 17,4 persen lagi tersebar diantara sektor-sektor lainnya, kecuali sektor otoritas moneter.

Tabungan

Dari Rp 4 093 miliar nilai rekening tabungan yang tersimpan di bank, dimiliki oleh rumahtangga sebesar Rp 4 029 miliar (98,44 persen) dan sisanya sebesar 1,56 persen adalah milik sektor lembaga keuangan bukan bank, perusahaan pemerintah dan swasta serta luar DKI Jakarta. Komposisi ini menunjukkan bahwa tidak hanya rumahtangga yang memanfaatkan jasa tabungan ini tetapi ada juga sektor bukan bank dan bisnis, walaupun dalam jumlah sedikit.

Deposito Berjangka

Pada tahun 1992 pertambahan transaksi ini sebesar Rp 4 871 miliar. Sektor terbesar yang memiliki deposito berjangka adalah sektor pemerintah Rp 1 979 miliar, sektor rumahtangga Rp 1 177 miliar, sektor bisnis Rp. 812 miliar, sektor perusahaan pemerintah Rp 499 miliar dan sisanya bukan bank, luar DKI dan bank.

Tabungan Giro Pos dan Koperasi

Pertambahan rekening tabungan giro pos dan koperasi pada tahun 1992 hanya sebesar Rp 127 miliar ditambah dengan tabungan dan sektor luar DKI (naik Rp 16 miliar dibanding tahun 1991). Pemilik tabungan jenis ini yang terbesar pemerintah Rp 101 miliar, yang digunakan untuk perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah. Sektor lainnya kecenderungan untuk menabung dan memakai tabungan dari transaksi ini belum ada.

Surat Berharga Jangka Pendek

Sektor terbesar yang mengeluarkan surat berharga jangka pendek adalah otoritas moneter, bukan bank, luar DKI dan bisnis, masing - masing sebesar Rp 9.653 miliar, Rp 1.119 miliar, Rp 2.180 dan Rp 661 miliar, sedangkan sektor bank pencipta uang giral menarik kembali surat berharga tersebut sebesar Rp 2.157 miliar. Pembeli/pemakaiannya adalah sektor bank pencipta uang giral Rp 9.570 miliar dan perusahaan pemerintah hanya Rp 5.189 miliar.

Kredit Bank dalam Rupiah

Pada tahun 1992, sektor bank mengeluarkan kreditnya sebesar Rp 6.444 miliar, dan otoritas moneter sebesar Rp 21 miliar serta sektor luar DKI Rp 622 miliar. Kredit bank tersebut sebagian besar digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sektor bisnis Rp 5.640 miliar, pemerintah Rp 928 miliar, luar DKI bukan bank sebesar Rp 231 miliar.

Kredit Institusi Lain dalam Rupiah

Kredit dalam rupiah yang diberikan oleh sektor bukan bank umumnya berasal dari luar DKI sebesar Rp4 513 miliar, pemerintah Rp 752 miliar, rumahtangga Rp 702 miliar dan perusahaan pemerintah Rp 63 miliar. Pemakai kredit tersebut umumnya sektor perbankan, yaitu mencapai Rp 3 391 miliar.

Kredit dalam Valas

Kredit dalam valas umumnya diberikan oleh sektor perbankan dan luar negeri, yang tujuannya untuk membiayai kegiatan dalam negeri. Pada tahun 1992, kredit tersebut diperoleh dari otoritas moneter dan bank sebesar Rp 4 834 miliar dan luar negeri sebesar Rp 6 894 miliar. Sedangkan penerima terbesar kredit tersebut adalah sektor perusahaan pemerintah Rp 8 542 miliar, sektor rumahtangga Rp 1 824 miliar dan pemerintah Rp 475 miliar.

Modal Saham dan Penyertaan

Pada tahun 1992 transaksi modal saham dan penyertaan dari seluruh sektor ekonomi tercatat sebesar Rp 11 411 miliar. Sebagian besar transaksi ini diperoleh dari penjualan saham perusahaan pemerintah Rp 5 856 miliar, sektor bisnis Rp 1 174 miliar, bank Rp 1 873 miliar, bukan bank Rp 2 508 miliar dan pemakaian terbesar dana ini adalah luar DKI sebesar Rp 14 891 miliar dan sektor rumahtangga yaitu sebesar Rp 2 200 miliar.

Surat Berharga Jangka Panjang

Transaksi surat berharga jangka panjang selama tahun 1992 tercatat sebesar Rp 2 210 miliar. Sebagian besar surat berharga ini dimiliki oleh sektor bank Rp 1 423 miliar, rumahtangga Rp 325 miliar dan luar DKI Rp 624 miliar. Sedangkan sektor lembaga keuangan bukan bank terlihat mengurangi jenis surat berharganya sebesar Rp 162 miliar dan pemakai terbesar transaksi ini adalah sektor bisnis sebesar Rp 1 577 miliar.

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Studi penyusunan NAD DKI Jakarta tahun 1991-1992 ini merupakan uji coba untuk melihat kemampuan dukungan data, tenaga, dan berbagai aspek teknis maupun non teknis lainnya.
- b. Dari segi pengadaan data ditemukan beberapa kendala yaitu belum lengkapnya data keuangan untuk sektor keuangan seperti dana pensiun dan lembaga pembiayaan. Untuk sektor bukan keuangan datanya jauh dari memuaskan, terutama sektor rumah tangga dan perusahaan swasta nonfinansial. Kedua sektor terakhir ini datanya dikumpulkan melalui survei khusus. Hal serupa berlaku pula untuk sektor luar daerah yang merupakan sektor residu. Untuk itu perlu dilakukan pengumpulan data untuk sektor yang bersangkutan secara lebih intensif.
- c. Secara umum kerangka NAD yang dibangun mengikuti kerangka NAD nasional karena sebagian besar peranan lembaga keuangan berada di DKI Jakarta, seperti aset bank pencipta uang giral pada tahun 1992/93 sebesar Rp 173 034 miliar atau 92% dari aset seluruh bank pencipta uang giral di Indonesia. Begitu pula perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun yang hampir seluruhnya berada di DKI Jakarta. Hal yang spesifik dari kerangka NAD DKI Jakarta

dibandingkan dengan NAD nasional (Indonesia) adalah dimunculkannya sektor luar DKI Jakarta pada NAD nasional, yang tidak saja mencakup sektor luar negeri tetapi juga sektor di luar DKI Jakarta tetapi masih di wilayah Indonesia. Sedangkan kategori instrumen finansialnya sama dengan kategori nasional.

d. Sejalan dengan keterbatasan data yang tersedia, maka estimasi untuk rumah tangga, perusahaan swasta nonfinansial dan luar daerah belum begitu memuaskan.

e. Dari hasil sementara NAD DKI Jakarta 1991-1992 diperoleh beberapa kesimpulan berikut :

(1) Apabila dilihat secara keseluruhan dalam Neraca Arus Dana (NAD) investasi sama dengan saving.

Tetapi apabila dilihat dari masing-masing sektor maka investasi tidak sama dengan tabungan (saving) sehingga selisih tersebut dicakup dalam transaksi pinjaman neto.

(2) Total finansial tahun 1991 sebesar Rp 93 277 miliar dan pada tahun 1992 sebesar Rp 116 293

(3) Sektor-sektor yang pada tahun 1991 mengalami surplus dana adalah sektor Bank (Rp 1 526 miliar), sektor bukan Bank (Rp 1 455 miliar), sektor Rumahtangga (Rp 1 594 miliar) dan sektor Pemerintah (Rp 559 miliar). Sedangkan sektor dunia usaha dalam hal ini adalah perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta masing-masing mengalami defisit sebesar Rp 4 210 miliar dan Rp 924 miliar. Pada tahun 1992, sektor yang mengalami surplus adalah

sektor Bank (Rp 143 miliar), sektor Rumahtangga (Rp 2 455 miliar) serta sektor di luar DKI Jakarta (Rp 143 miliar), sedangkan sektor lainnya adalah sektor defisit.

(4) Sektor yang mengalami surplus terbesar pada tahun 1991 adalah sektor Rumahtangga, sedangkan sektor defisit terbesar adalah sektor Perusahaan Pemerintah. Tahun 1992 posisi untuk sektor dengan surplus terbesar dan defisit terbesar masih sama dengan posisi pada tahun 1991 yaitu Rumahtangga dan perusahaan pemerintah.

(5) Pada tahun 1991 seluruh investasi di DKI Jakarta masih bisa dipenuhi dengan tabungan yang ada, sedangkan pada tahun 1992 sektor luar DKI Jakarta berperan untuk ikutserta dalam investasi di DKI Jakarta karena dana tabungan yang tersedia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan investasinya.

f. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan sistem neraca regional DKI Jakarta dan sekaligus dapat pula membantu sistem neraca nasional. Di samping itu dengan bertambahnya perangkat yang dapat merangkum berbagai statistik keuangan dari berbagai institusi, diharapkan bisa dimanfaatkan oleh pakar ekonomi moneter, pengamat pasar modal dan pengamat lainnya.

2. S a r a n

- a. Mengingat besarnya peranan DKI Jakarta dalam bidang keuangan dan NAD sebagai salah satu kerangka yang dirancang untuk memungkinkan dilakukannya berbagai analisis keuangan dan pasar modal, maka penyusunan NAD secara berkesinambungan sangat direkomendasikan.
- b. Untuk mewujudkan kualitas NAD yang lebih baik langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pengumpulan data yang selama ini dilakukan terutama data laporan keuangan yang berasal dari sektor dana pensiun, rumah tangga, dan luar daerah.
- c. Karena peranan perusahaan swasta nonfinansial yang di dalamnya termasuk juga perusahaan-perusahaan yang "go public". Untuk itu prioritas pengumpulan data sektor ini dapat diarahkan kepada seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang asetnya terbesar, katakan 200 terbesar.
- d. Untuk mengestimasi sektor luar daerah harus dilakukan penelitian khusus yang berkaitan dengan ekspor dan impor dari/ke luar DKI Jakarta. Begitu pula arus uang yang masuk dan keluar dari dan ke DKI Jakarta. Hal ini merupakan upaya yang tidak sederhana. Paling tidak perlu melibatkan instansi terkait seperti Bank Indonesia.
- e. Kesenambungan Penyusunan NAD DKI Jakarta di masa datang dirasakan sangat dibutuhkan tidak hanya dari sudut pengembangan statistik keuangan regional tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk penilaian, analisis dan pembuatan kebijakan di sektor keuangan.

LAMPIRAN 1

<https://jakarta.bps.go.id>

**DEFINISI KATEGORI TRANSAKSI NERACA ARUS DANA INDONESIA
YANG DIPAKAI UNTUK NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA**

0100 TABUNGAN BRUTO

Tabungan bruto merupakan jumlah dari penyusutan barang modal tetap dan tabungan neto.

0110 PENYUSUTAN BARANG MODAL

Penyusutan barang modal (PBM) merupakan biaya penyusutan barang modal tetap (pabrik, mesin dan perlengkapan) karena aus/rusak dalam proses produksi yang dibebankan pada biaya operasi perusahaan. Biaya penyusutan sesungguhnya bukan merupakan pengeluaran dana. Selain dari itu, penyusutan barang modal meliputi juga perkiraan penyusutan rumah yang dimiliki perorangan dan barang modal tetap milik perusahaan.

0120 TABUNGAN NETO

Tabungan neto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan ekonomi suatu sektor setelah dikurangi penyusutan barang modal. Penerimaan meliputi pendapatan dari penjualan barang dan jasa, balas jasa faktor tenaga kerja seperti upah dan gaji serta pendapatan kepemilikan seperti bunga dan sewa. Penerimaan juga mencakup penerimaan transfer berjalan, seperti subsidi dari pemerintah yang diterima oleh sektor usaha, bantuan luar negeri yang diterima oleh pemerintah, pensiun yang diterima oleh sektor rumah tangga, dan pajak yang diterima oleh pemerintah. Pengeluaran mencakup baik pengeluaran barang dan jasa yang dibayarkan kepada sektor lain, maupun pembayaran

dividen dan transfer seperti pembayaran pajak. Pengeluaran untuk barang modal tetap dan persediaan dimaksudkan sebagai pengeluaran modal.

0200 PEROLEHAN HARTA NON FINANSIAL

Merupakan penjumlahan dari pembentukan modal tetap bruto, kenaikan stok dan pembelian harta tak berwujud neto.

0210 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Yang dimaksud dengan pembentukan modal tetap bruto adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan, bandara, serta mesin peralatan. Pengeluaran barang modal dan bangunan untuk keperluan militer tidak dicakup disini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

0220 KENAIKAN STOK

Yang dimaksud kenaikan stok adalah perubahan nilai persediaan pada akhir tahun dikurangi dengan persediaan pada awal tahun. Persediaan meliputi bahan baku, pekerjaan yang masih dalam proses dan barang jadi yang belum terjual. Termasuk juga disini persediaan dibidang pertanian seperti ternak dan hasil pertanian. Perubahan persediaan emas yang dikuasai oleh Otoritas Moneter merupakan bagian dari kategori transaksi cadangan valuta asing pemerintah (0800).

0300 PINJAMAN NETO = 0100-0200

Pinjaman neto merupakan selisih antara tabungan bruto dengan perolehan harta nonfinansial.

0400 SELISIH STATISTIK = 0300-0500

Selisih statistik adalah selisih antara peminjaman neto (sisi transaksi real, bagian atas NAD) dan investasi neto (sisi finansial NAD). Kalau dalam persamaan akuntansi total aset sama dengan kewajiban plus kekayaan neto, maka peminjaman neto harus sama dengan investasi finansial neto. Tetapi karena data diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda cakupannya, maka terjadi ketidakkonsistenan yang menimbulkan selisih tersebut. Penyebab utama adanya selisih statistik, di beberapa sektor adalah adanya perbedaan sumber data antara bagian atas NAD dan sisi finansialnya.

0500 INVESTASI FINANSIAL NETO = 0600-0700

Merupakan selisih antara jumlah penggunaan finansial (kenaikan harta finansial neto) dengan jumlah sumber finansial (kenaikan kewajiban finansial neto).

0600 JUMLAH PENGGUNAAN FINANSIAL

Merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi pasiva. Kenaikan sumber finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0700 JUMLAH SUMBER FINANSIAL

Merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi pasiva. Kenaikan sumber finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0800 CADANGAN VALUTA ASING PEMERINTAH

Cadangan valuta asing (valas) pemerintah terdiri dari emas moneter, spesial drawing rights, posisi cadangan di IMF, deposito, dan surat berharga dalam valuta asing yang dimiliki oleh Otoritas Moneter. Cadangan valas pemerintah adalah aktiva Otoritas Moneter dan merupakan kewajiban sektor luar negeri. Dalam penghitungan pendapatan nasional, emas moneter (dalam bentuk fisik) diperlukan sebagai hutang luar negeri.

0810 EMAS MONETER

Mencakup emas yang dimiliki atau disimpan Bank Indonesia, termasuk juga emas yang disimpan pada lembaga keuangan luar negeri. Lawan dari aktiva finansial ini merupakan pasiva di sektor luar negeri.

0820 SPECIAL DRAWING RIGHTS (SDR)

Merupakan aktiva cadangan yang diciptakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai pelengkap emas dan mata uang cadangan.

0830 POSISI CADANGAN DI IMF

Merupakan klaim negara kepada IMF.

0840 CADANGAN VALUTA ASING

Kategori ini mencakup mata uang asing yang dikuasai dan disimpan Bank Indonesia, giro dan deposito berjangka di bank-bank luar negeri, wesel ekspor yang didiskontokan lagi oleh bank-bank devisa di Indonesia, investasi dalam surat-surat berharga luar negeri dan klaim atas pemerintah pusat.

.1h14

0850 LAINNYA

Mencakup seluruh klaim luar negeri Bank Indonesia yang tidak termasuk dalam kategori 0810 sampai dengan 0840.

0900 KLAIM DALAM VALUTA ASING LAINNYA

Mencakup semua jenis klaim valas yang tidak termasuk dalam kategori transaksi : cadangan valas pemerintah, deposito dalam valas, pinjaman dalam valas, tagihan jangka pendek dan jangka panjang dalam valas, serta obligasi.

1000 UANG DAN SIMPANAN (JUMLAH)

Terdiri dari seluruh jenis mata uang yang dipegang oleh penduduk, deposito dan giro di bank dan giro pos baik dalam rupiah maupun valas, serta deposito dan simpanan yang dimiliki penduduk pada bank asing di luar negeri. Yang termasuk kategori ini adalah uang kartal dan uang logam yang beredar, giro, tabungan, deposito berjangka dan tabungan giro pos.

1010 UANG DAN SIMPANAN DALAM VALUTA ASING

Mencakup semua jenis mata uang yang dipegang oleh penduduk dan tabungan valas yang disimpan di Bank Indonesia, bank-bank pencipta uang giral (BPUG), dan bank asing yang dinilai dalam rupiah.

1011 UANG

Mencakup semua jenis uang kertas dan uang logam dalam valas.

1012 GIRO

Merupakan simpanan dalam mata uang asing di bank yang dapat ditarik dengan menggunakan cek.

1013 TABUNGAN

Merupakan tabungan dalam mata uang asing yang dapat dengan menunjukkan buku tabungan.

1014 DEPOSITO BERJANGKA

Merupakan deposito dalam valas yang dapat ditarik jika telah disimpan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan persetujuan antara penabung dan bank saat perjanjian dibuat.

1019 TABUNGAN LAINNYA

Mencakup semua tabungan valas yang tidak termasuk dalam kategori 1011 sampai dengan 1014.

1020 UANG DAN SIMPANAN DALAM RUPIAH

Mencakup semua jenis mata uang rupiah yang dipegang oleh penduduk dan simpanan pada Bank Indonesia, BPUG, dan bank asing, Kantor Pos dan Giro dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.

1021 UANG KERTAS DAN LOGAM

Mencakup uang kertas dan logam yang dipegang oleh masyarakat termasuk kas negara dan BPUG. uang adalah bukti hutang Otoritas Moneter kepada masyarakat umum.

1022 GIRO

Merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek. Giro antar bank tidak dimasukkan dalam kategori ini, tetapi masuk kategori klaim antar bank (2000).

1023 TABUNGAN

Merupakan tabungan yang dapat ditarik dengan menggunakan bukti buku tabungannya.

1024 DEPOSITO BERJANGKA

Deposito berjangka adalah jenis tabungan yang hanya dapat ditarik setelah jangka waktu sesuai dengan perjanjian antara bank dan depositor pada saat pembukuan tabungan.

1030 TABUNGAN GIRO POS DAN KOPERASI

Tabungan giro pos merupakan hutang Kantor Pos dan Giro, berupa tabungan dan giro. Sedangkan tabungan koperasi merupakan tabungan wajib dan sukarela.

1100 SURAT BERHARGA JANGKA PENDEK

Kategori ini mencakup surat tanda hutang jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Surat berharga ini dapat dikeluarkan oleh perusahaan swasta atau sektor pemerintah baik dalam nilai rupiah maupun mata uang asing lainnya.

1200 KREDIT (JUMLAH)

Kategori ini menunjukkan jumlah pinjaman bank dan pinjaman dari institusi lainnya baik dalam rupiah maupun valas. Pinjaman merupakan hasil persetujuan antara peminjam dengan

si pemberi pinjaman. Pinjaman adalah instrumen finansial yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar uang. Ciri terakhir inilah yang membedakan pinjaman dari surat berharga jangka pendek.

1210 KREDIT BANK DALAM RUPIAH

Mencakup pinjaman (kredit) dan cerukan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, BPUG, dan bank lain di Indonesia. Kredit bank biasanya digunakan untuk tujuan bisnis, tetapi kredit bank untuk individu (bukan bisnis) digolongkan pada kredit konsumsi ; termasuk didalamnya kredit pemilikan barang tak bergerak. Kategori ini mencakup pinjaman bank dalam rupiah saja, sedangkan pinjaman bank dalam valas dimasukkan dalam kategori pinjaman dalam valas (1230).

1211 KREDIT MODAL KERJA

Kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari.

1212 KREDIT INVESTASI

Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.

1213 KREDIT KONSUMSI

Kredit konsumsi adalah kredit perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau

barang konsumsi barang tahan lama lainnya. Hutang hipotek atau persetujuan penjualan yang dijamin oleh harta berwujud seperti tanah dan bangunan tempat tinggal juga termasuk dalam kategori ini.

1220 KREDIT INSTITUSI LAIN DALAM RUPIAH

Kategori ini dimaksudkan untuk menampung semua jenis pinjaman dalam rupiah yang diberikan oleh berbagai institusi selain bank. Kredit oleh lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan non finansial baik pemerintah maupun swasta termasuk disini.

1221 KREDIT MODAL KERJA

Lihat definisi 1211.

1222 KREDIT INVESTASI

Lihat definisi 1212.

1223 KREDIT KONSUMSI

Kategori ini mencakup pinjaman dalam rupiah dari perusahaan asuransi jiwa, koperasi, LKBB, dan lembaga keuangan lainnya, tidak termasuk bank.

1230 KREDIT DALAM VALUTA ASING

Mencakup semua jenis pinjaman dalam valuta asing dari semua sektor ekonomi baik di dalam negeri maupun luar negeri.

1300 MODAL SAHAM PENYERTAAN

Mencakup segala jenis saham baik yang diperjualbelikan maupun tidak diperjualbelikan. Dalam kategori ini termasuk juga penyertaan modal pemerintah dan penyertaan sektor-sektor lainnya. Dalam NAD yang dicatat adalah saham baru yang diterbitkan, pembelian kembali saham serta jualbeli saham yang beredar berdasarkan harga pasar.

1400 MODAL BERTAGIA JANGKA PANJANG (JUMLAH)

Kategori ini mencakup hutang jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Obligasi adalah surat bertagia yang dapat dipindahtangankan, tidak seperti hutang. Hutang obligasi tidak selalu dijamin oleh harta realnya. kategori ini merupakan jumlah obligasi pemerintah dan surat bertagia jangka panjang lainnya baik dalam nilai rupiah maupun valas.

1410 SURAT BERTAGIA PEMERINTAH (JUMLAH)

Kategori ini mencakup semua surat bertagia jangka panjang pemerintah yang dijual di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kategori ini meliputi surat bertagia jangka panjang dalam nilai rupiah dan valas. Obligasi yang dikeluarkan oleh BUMN dimasukkan dalam kategori surat bertagia jangka panjang lainnya (1420).

1420 SURAT BERTAGIA LAINNYA

Kategori ini mencakup surat bertagia jangka panjang dalam pengertian luas, yang dikeluarkan bukan oleh pemerintah. Jenis surat bertagia ini dapat dikeluarkan oleh sektor dalam negeri maupun luar negeri. Surat bertagia hipotek termasuk

disini, tetapi bukan untuk kredit pemilikan rumah. Surat berharga ini dapat juga diterbitkan oleh yayasan, perusahaan swasta dan BUMN.

1500 CADANGAN ASURANSI DAN PENSIUN

Mencakup cadangan asuransi jiwa, asuransi nonjiwa, asuransi sosial dan dana pensiun. Bagi asuransi jiwa dan dana pensiun merupakan hutang perusahaan asuransi jiwa kepada pemegang polis dan hutang perusahaan dana pensiun kepada anggotanya. Bagi asuransi non jiwa transaksi ini mencakup cadangan perusahaan asuransi non jiwa yang digunakan untuk membiayai klaim yang belum dibayar atau klaim dimasa yang akan datang. Cadangan teknis pada asuransi nonjiwa pada dasarnya adalah harta perorangan, perusahaan dan pemerintah di semua sektor, yang tidak dapat dicatat sebagai harta pada pembukuan pemegang polis.

1800 KREDIT DAGANG

Mencakup kredit jangka pendek yang terjadi dalam bisnis berupa hutang piutang antara pemasok dan pembeli barang dan jasa. Kredit ini berlangsung sejak barang dan jasa diserahkan sampai dengan pembayaran diterima. Kredit dagang bukan merupakan instrumen finansial yang dapat diperjualbelikan seperti instrumen pasar uang, maupun dinegosiasikan seperti hutang bank. Kredit dagang antara perusahaan afiliasi termasuk dalam kategori ini. Karena arus finansial dari perusahaan dalam negeri tidak dicatat atas dasar nilai yang dikonsolidasikan, maka kredit dagang dalam NAD merupakan arus intra-sektor.

2000 REKENING ANTAR BANK

Rekening antar bank adalah semua jenis klaim yang terjadi antara bank yang satu dengan bank lainnya. Tidak termasuk disini rekening antar kantor, antar cabang dan kantor pusat, atau diantara cabang dari bank yang sama. Rekening antar kantor dinetokan (sisi pasiva dikurangi dengan aktivanya) dan dimasukkan dalam kategori rupa-rupa (9000).

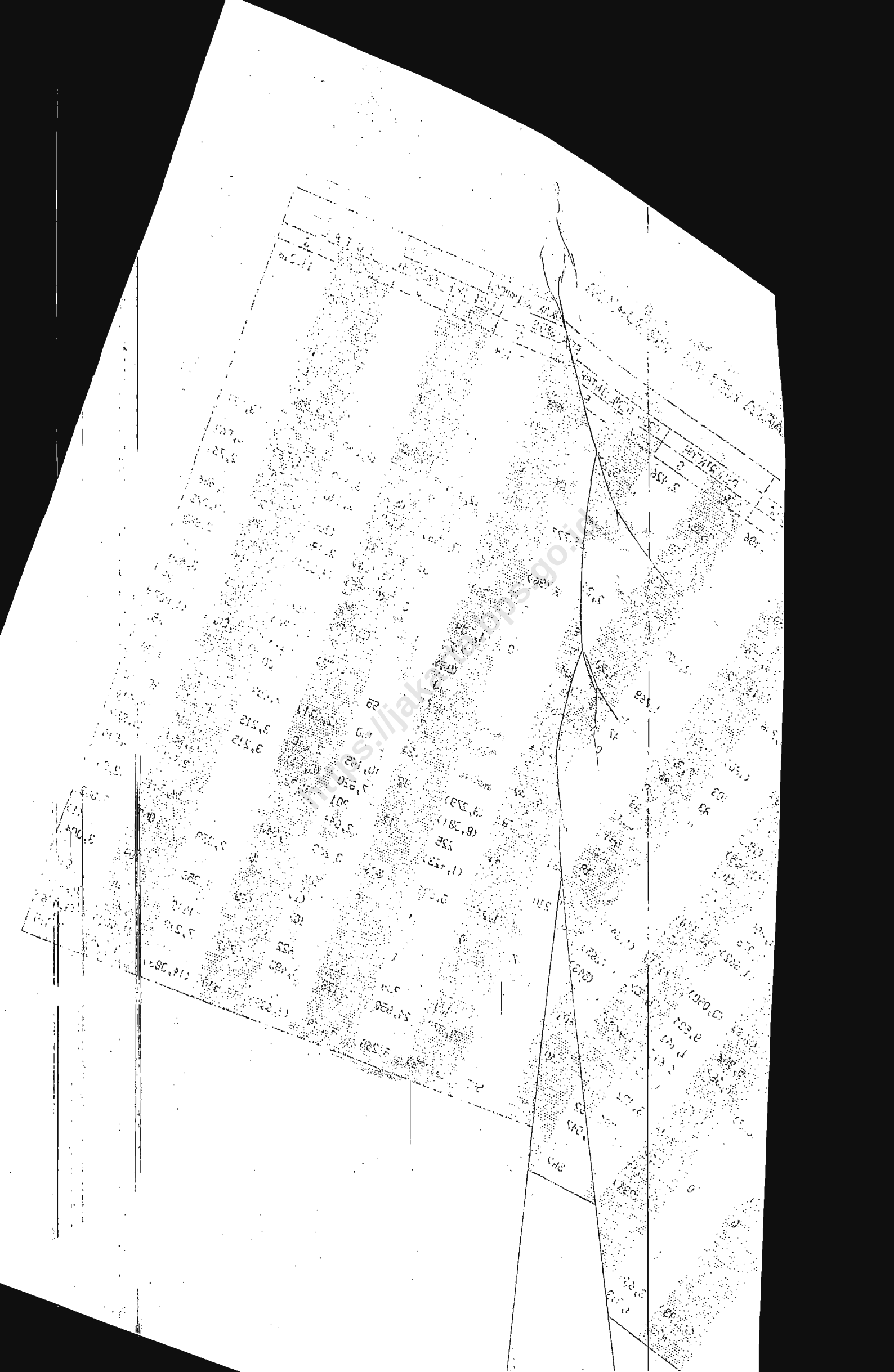
9000 RUPA-RUPA

Kategori ini mencakup berbagai transaksi lainnya yang tidak termasuk di dalam semua kategori yang disebutkan di atas.

<https://jakarta.bps.go.id>

LAMPIRAN 2

<https://jakarta.bps.go.id>



**TABEL 3. RINGKASAN NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA SEKTOR
OTORITAS MONETER TAHUN 1991 - 1992, (MILIAR RUPIAH)**

KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN			
	1991		1992	
	P	S	P	S
0100 TABUNGAN BRUTO	0	-528	0	157
0200 INVESTASI NON FINANSIAL	192	0	112	0
0300 PINJAMAN NETO = 0100-0200	-720	0	45	0
0400 SELISIH STATISTIK = 0300-0500	0	0	0	0
0500 INVESTASI FINANSIAL NETO = 0600-0700	-720	0	45	0
0600 JUMLAH PENGGUNAAN FINANSIAL	6054	0	9251	0
0700 JUMLAH SUMBER FINANSIAL	0	6774	0	9206
0800 CADANGAN VALUTA ASING PEMERINTAH	6640	-578	9379	0
0900 KLAIM DALAM VALUTA ASING LAINNYA	0	0	365	-965
1000 UANG DAN SIMPANAN (JUMLAH)	0	1246	0	5751
1010 UANG DAN SIMPANAN DALAM VALUTA ASING	0	-1668	0	-15
1020 UANG DAN SIMPANAN DALAM RUPIAH	0	2914	0	5766
1021 UANG KERTAS DAN LOGAM	0	520	0	2238
1022 GIRO	0	2394	0	3528
1023 TABUNGAN	0	0	0	0
1024 DEPOSITO BERJANGKA	0	0	0	0
1030 TABUNGAN GIRO POS DAN KOPERASI	0	0	0	0
1100 SURAT BERTHARGA JANGKA PENDEK	1688	0	-588	9653
1200 PINJAMAN (JUMLAH)	-127	-867	1485	-751
1210 KREDIT BANK DALAM RUPIAH	-563	0	21	0
1220 PINJAMAN INSTITUSI LAIN DALAM RUPIAH	0	-867	0	-751
1230 PINJAMAN DALAM VALUTA ASING	436	0	1464	0
1300 MODAL (JUMLAH)	21	0	12	0
1400 SURAT BERTHARGA JANGKA PANJANG (JUMLAH)	0	0	0	0
1410 SURAT BERTHARGA PEMERINTAH	0	0	0	0
1420 SURAT BERTHARGA LAINNYA	0	0	0	0
1500 CADANGAN ASURANSI JIWA DAN PENSIUN	0	0	0	0
1800 KREDIT DAGANG	0	0	0	0
2000 KLAIM ANTARBANK	-2993	3660	-1429	-862
9000 RUPA-RUPA	825	3313	27	-3620

KETERANGAN : P = Penggunaan, S = Sumber

TABEL 4. RINGKASAN NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA SEKTOR BANK
TAHUN 1991 - 1992, (MILIAR RUPIAH)

KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN			
	1991		1992	
	P	S	P	S
0100 TABUNGAN BRUTO	0	3284	0	915
0200 INVESTASI NON FINANSIAL	1038	0	817	0
0300 PINJAMAN NETO = 0100-0200	2246	0	88	0
0400 SELISIH STATISTIK = 0300-0500	0	0	0	0
0500 INVESTASI FINANSIAL NETO = 0600-0700	2246	0	88	0
0600 JUMLAH PENGGUNAAN FINANSIAL	19372	0	20984	0
0700 JUMLAH SUMBER FINANSIAL	0	17131	0	20886
0800 CADANGAN VALUTA ASING PEMERINTAH	0	0	0	0
0900 KLAIM DALAM VALUTA ASING LAINNYA	691	-60	2428	1719
1000 UANG DAN SIMPANAN (JUMLAH)	2138	4234	2897	12211
1010 UANG DAN SIMPANAN DALAM VALUTA ASING	1670	1632	2388	2697
1020 UANG DAN SIMPANAN DALAM RUPIAH	468	2602	509	9514
1021 UANG KERTAS DAN LOGAM	63	0	51	0
1022 GIRO	361	1889	455	667
1023 TABUNGAN	0	2375	0	4091
1024 DEPOSITO BERJANGKA	44	-1662	3	4756
1030 TABUNGAN GIRO POS DAN KOPERASI	0	0	0	0
1100 SURAT BERHARGA JANGKA PENDEK	-526	-3050	9570	-2157
1200 PINJAMAN (JUMLAH)	15382	9586	9814	2291
1210 KREDIT BANK DALAM RUPIAH	10388	1161	6444	-193
1220 PINJAMAN INSTITUSI LAIN DALAM RUPIAH	0	6645	0	2484
1230 PINJAMAN DALAM VALUTA ASING	4994	1780	3370	0
1300 MODAL (JUMLAH)	601	3122	683	1873
1400 SURAT BERHARGA JANGKA PANJANG (JUMLAH)	-232	786	1423	325
1410 SURAT BERHARGA PEMERINTAH	-1	0	0	0
1420 SURAT BERHARGA LAINNYA	-231	786	1423	325
1500 CADANGAN ASURANSI JIWA DAN PENSIUN	0	0	0	0
1800 KREDIT DAGANG	0	0	0	0
2000 KLAIM ANTARBANK	1517	-5136	339	-228
9000 RUPA-RUPA		7649	-6170	4852

KETERANGAN : P = Penggunaan, S = Sumber

TABEL 5. RINGKASAN NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA
SEKTOR BUKAN BANK TAHUN 1991 - 1992, (MILIAR RUPIAH)

KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN			
	1991		1992	
	P	S	P	S
0100 TABUNGAN BRUTO	0	1891	0	298
0200 INVESTASI NON FINANSIAL	436	0	520	0
0300 PINJAMAN NETO = 0100-0200	1455	0	-222	0
0400 SELISIH STATISTIK = 0300-0500	0	0	0.003	0
0500 INVESTASI FINANSIAL NETO = 0600-0700	1455	0	-222.003	0
0600 JUMLAH PENGGUNAAN FINANSIAL	3191	0	9250.997	0
0700 JUMLAH SUMBER FINANSIAL	0	1736	0	9473
0800 CADANGAN VALUTA ASING PEMERINTAH	0	0	0	0
0900 KLAIM DALAM VALUTA ASING LAINNYA	-46	-180	1774	131
1000 UANG DAN SIMPANAN (JUMLAH)	-1785	183	939.997	87
1010 UANG DAN SIMPANAN DALAM VALUTA ASING	-185	183	433	87
1020 UANG DAN SIMPANAN DALAM RUPIAH	-1595	0	507	0
1021 UANG KERTAS DAN LOGAM	-15	0	62	0
1022 GIRO	1558	0	38	0
1023 TABUNGAN	0	0	42	0
1024 DEPOSITO BERJANGKA	-3138	0	365	0
1030 TABUNGAN GIRO POS DAN KOPERASI	-5	0	-0.003	0
1100 SURAT BERTAHAGA JANGKA PENDEK	-124	-1641	74	1119
1200 PINJAMAN (JUMLAH)	-1753	-265	360	328
1210 KREDIT BANK DALAM RUPIAH	0	-543	0	684
1220 PINJAMAN INSTITUSI LAIN DALAM RUPIAH	-1753	-51	360	-392
1230 PINJAMAN DALAM VALUTA ASING	0	329	0	36
1300 MODAL (JUMLAH)	39	474	979	2508
1400 SURAT BERTAHAGA JANGKA PANJANG (JUMLAH)	1974	-256	-162	530
1410 SURAT BERTAHAGA PEMERINTAH	0	0	0	0
1420 SURAT BERTAHAGA LAINNYA	1974	-256	-162	530
1500 CADANGAN ASURANSI JIWA DAN PENSUN	187	1292	-28	816
1800 KREDIT DAGANG	3326	1547	1711	1543
2000 KLAIM ANTARBANK	0	0	0	0
9000 RUPA-RUPA	1373	582	3604	2411

KETERANGAN : P = Penggunaan, S = Sumber

**TABEL 6. RINGKASAN NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA SEKTOR
RUMAHTANGGA TAHUN 1991 - 1992, (MILIAR RUPIAH)**

KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN			
	1991		1992	
	P	S	P	S
0100 TABUNGAN BRUTO	0	0	0	0
0200 INVESTASI NON FINANSIAL	1902	0	2677	0
0300 PINJAMAN NETO = 0100-0200	1594	0	2455	0
0400 SELISIH STATISTIK = 0300-0500	0	0	0	0
0500 INVESTASI FINANSIAL NETO = 0600-0700	1594	0	2455	0
0600 JUMLAH PENGGUNAAN FINANSIAL	14462	0	13739	0
0700 JUMLAH SUMBER FINANSIAL	0	0	0	0
0800 CADANGAN VALUTA ASING PEMERINTAH	0	0	0	0
0900 KLAIM DALAM VALUTA ASING LAINNYA	1549	0	-387	0
1000 UANG DAN SIMPANAN (JUMLAH)	7971	0	7182	0
1010 UANG DAN SIMPANAN DALAM VALUTA ASING	2464	0	355	0
1020 UANG DAN SIMPANAN DALAM RUPIAH	5488	0	6804	0
1021 UANG KERTAS DAN LOGAM	98	0	702	0
1022 GIRO	969	0	896	0
1023 TABUNGAN	591	0	4029	0
1024 DEPOSITO BERJANGKA	3830	0	1177	0
1030 TABUNGAN GIRO POS DAN KOPERASI	19	0	23	0
1100 SURAT BERTAHAGA JANGKA PENDEK	0	0	0	0
1200 PINJAMAN (JUMLAH)	3203	0	702	0
1210 KREDIT BANK DALAM RUPIAH	0	0	0	0
1220 PINJAMAN INSTITUSI LAIN DALAM RUPIAH	3203	0	702	0
1230 PINJAMAN DALAM VALUTA ASING	0	0	0	0
1300 MODAL (JUMLAH)	1542	0	2200	0
1400 SURAT BERTAHAGA JANGKA PANJANG (JUMLAH)	601	0	325	0
1410 SURAT BERTAHAGA PEMERINTAH	0	0	0	0
1420 SURAT BERTAHAGA LAINNYA	601	0	325	0
1500 CADANGAN ASURANSI JIWA DAN PENSIUN	37	0	48	0
1800 KREDIT DAGANG	4	0	459	0
2000 KLAIM ANTARBANK	0	0	0	0
9000 RUPA-RUPA	-445	0	3210	0

KETERANGAN : P = Penggunaan, S = Sumber

**TABEL 7. RINGKASAN NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA SEKTOR
PEMERINTAH TAHUN 1991 - 1992, (MILIAR RUPIAH)**

KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN			
	1991		1992	
	P	S	P	S
0100 TABUNGAN BRUTO	3496	0	2258	0
0200 INVESTASI NON FINANSIAL	0	1867	0	4614
0300 PINJAMAN NETO = 0100-0200	0	559	0	-2388
0400 SELISIH STATISTIK = 0300-0500	0	0	0	0
0500 INVESTASI FINANSIAL NETO = 0600-0700	0	559	0	-2388
0600 JUMLAH PENGGUNAAN FINANSIAL	0	2920	0	27375
0700 JUMLAH SUMBER FINANSIAL	12868	0	2899	0
0800 CADANGAN VALUTA ASING PEMERINTAH	0	0	0	0
0900 KLAIM DALAM VALUTA ASING LAINNYA	1768	1289	-390	15
1000 UANG DAN SIMPANAN (JUMLAH)	47	4103	0	4831
1010 UANG DAN SIMPANAN DALAM VALUTA ASING	47	-342	0	87
1020 UANG DAN SIMPANAN DALAM RUPIAH	0	4444	0	4744
1021 UANG KERTAS DAN LOGAM	0	-68	0	524
1022 GIRO	0	2701	0	3717
1023 TABUNGAN	0	0	0	4
1024 DEPOSITO BERJANGKA	0	1811	0	499
1030 TABUNGAN GIRO POS DAN KOPERASI	0	1	0	0
1100 SURAT BERHARGA JANGKA PENDEK	0	0	0	5189
1200 PINJAMAN (JUMLAH)	7062	1173	1403	63
1210 KREDIT BANK DALAM RUPIAH	451	0	928	0
1220 PINJAMAN INSTITUSI LAIN DALAM RUPIAH	5706	1173	0	63
1230 PINJAMAN DALAM VALUTA ASING	905	0	475	0
1300 MODAL (JUMLAH)	0	985	0	-8463
1400 SURAT BERHARGA JANGKA PANJANG (JUMLAH)	0	0	1132	0
1410 SURAT BERHARGA PEMERINTAH	0	0	0	0
1420 SURAT BERHARGA LAINNYA	0	0	1132	0
1500 CADANGAN ASURANSI JIWA DAN PENSUN	0	0	0	24
1800 KREDIT DAGANG	5	0	0	16991
2000 KLAIM ANTARBANK	0	0	0	0
9000 RUPA-RUPA	3986	-4630	754	8725

KETERANGAN : P = Penggunaan, S = Sumber

**TABEL 8. RINGKASAN NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA SEKTOR
PERUSAHAAN PEMERINTAH TAHUN 1991 - 1992, (MILIAR RUPIAH)**

KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN			
	1991		1992	
	P	S	P	S
0100 TABUNGAN BRUTO	2426	0	2258	0
0200 INVESTASI NON FINANSIAL	0	5795	0	4614
0300 PINJAMAN NETO = 0100-0200	0	-4210	0	-2388
0400 SELISIH STATISTIK = 0300-0500	0	0	0	0
0500 INVESTASI FINANSIAL NETO = 0600-0700	0	-4210	0	-2388
0600 JUMLAH PENGGUNAAN FINANSIAL	0	22517	0	27375
0700 JUMLAH SUMBER FINANSIAL	2361	0	2899	0
0800 CADANGAN VALUTA ASING PEMERINTAH	0	0	0	0
0900 KLAIM DALAM VALUTA ASING LAINNYA	1168	-249	-390	15
1000 UANG DAN SIMPANAN (JUMLAH)	0	3679	0	4831
1010 UANG DAN SIMPANAN DALAM VALUTA ASING	0	1437	0	87
1020 UANG DAN SIMPANAN DALAM RUPIAH	0	2004	0	4744
1021 UANG KERTAS DAN LOGAM	0	167	0	524
1022 GIRO	0	455	0	3717
1023 TABUNGAN	0	1	0	4
1024 DEPOSITO BERJANGKA	0	1381	0	499
1030 TABUNGAN GIRO POS DAN KOPERASI	0	238	0	0
1100 SURAT BERHARGA JANGKA PENDEK	0	4387	0	5189
1200 PINJAMAN (JUMLAH)	601	88	1403	63
1210 KREDIT BANK DALAM RUPIAH	391	0	928	0
1220 PINJAMAN INSTITUSI LAIN DALAM RUPIAH	0	88	0	63
1230 PINJAMAN DALAM VALUTA ASING	210	0	475	0
1300 MODAL (JUMLAH)	0	1261	0	-8463
1400 SURAT BERHARGA JANGKA PANJANG (JUMLAH)	7	0	1132	0
1410 SURAT BERHARGA PEMERINTAH	0	0	0	0
1420 SURAT BERHARGA LAINNYA	7	0	1132	0
1500 CADANGAN ASURANSI JIWA DAN PENSUN	0	174	0	24
1800 KREDIT DAGANG	0	28970	0	16991
2000 KLAIM ANTARBANK	0	0	0	0
9000 RUPA-RUPA	585	-15793	754	8725

KETERANGAN : P = Penggunaan, S = Sumber

TABEL 9. RINGKASAN NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA SEKTOR BISNIS
TAHUN 1991 - 1992, (MILIAR RUPIAH)

KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN			
	1991		1992	
	P	S	P	S
0100 TABUNGAN BRUTO	1585	0	2226	0
0200 INVESTASI NON FINANSIAL	0	3088	0	5930
0300 PINJAMAN NETO = 0100-0200	0	-924	0	-1054
0400 SELISIH STATISTIK = 0300-0500	0	0	0	0
0500 INVESTASI FINANSIAL NETO = 0600-0700	0	-924	0	-1054
0600 JUMLAH PENGGUNAAN FINANSIAL	0	11216	0	7904
0700 JUMLAH SUMBER FINANSIAL	26727	0	29763	0
0800 CADANGAN VALUTA ASING PEMERINTAH	0	0	0	0
0900 KLAIM DALAM VALUTA ASING LAINNYA	-96	72	-72	163
1000 UANG DAN SIMPANAN (JUMLAH)	0	1211	97	1639
1010 UANG DAN SIMPANAN DALAM VALUTA ASING	0	0	0	239
1020 UANG DAN SIMPANAN DALAM RUPIAH	0	1209	0	1397
1021 UANG KERTAS DAN LOGAM	0	277	0	104
1022 GIRO	0	-95	0	480
1023 TABUNGAN	0	40	0	1
1024 DEPOSITO BERJANGKA	0	987	0	812
1030 TABUNGAN GIRO POS DAN KOPERASI	0	2	97	3
1100 SURAT BERTAHAGA JANGKA PENDEK	0	-2	0	4
1200 PINJAMAN (JUMLAH)	-9279	42	9186	44
1210 KREDIT BANK DALAM RUPIAH	-8081	0	597	0
1220 PINJAMAN INSTITUSI LAIN DALAM RUPIAH	225	42	47	44
1230 PINJAMAN DALAM VALUTA ASING	-1423	0	8542	0
1300 MODAL (JUMLAH)	5636	509	5856	221
1400 SURAT BERTAHAGA JANGKA PANJANG (JUMLAH)	1	0	3	0
1410 SURAT BERTAHAGA PEMERINTAH	0	0	0	0
1420 SURAT BERTAHAGA LAINNYA	1	0	3	0
1500 CADANGAN ASURANSI JIWA DAN PENSUN	239	536	-813	374
1800 KREDIT DAGANG	24958	3129	6881	1885
2000 KLAIM ANTARBANK	0	0	0	0
9000 RUPA-RUPA	5268	5719	8625	3574

KETERANGAN : P = Penggunaan, S = Sumber

**TABEL 10. RINGKASAN NERACA ARUS DANA DKI JAKARTA SEKTOR
LUAR DKI JAKARTA TAHUN 1991 - 1992, (MILIAR RUPIAH)**

KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN			
	1991		1992	
	P	S	P	S
0100 TABUNGAN BRUTO	2164	0	4876	0
0200 INVESTASI NON FINANSIAL	0	0	0	0
0300 PINJAMAN NETO = 0100-0200	0	0	0	1126
0400 SELISIH STATISTIK = 0300-0500	0	0	0	0
0500 INVESTASI FINANSIAL NETO = 0600-0700	0	0	0	1126
0600 JUMLAH PENGGUNAAN FINANSIAL	0	13540	0	24950
0700 JUMLAH SUMBER FINANSIAL	12140	0	8958	0
0800 CADANGAN VALUTA ASING PENERINTAH	0	-578	0	0
0900 KLAIM DALAM VALUTA ASING LAINNYA	-2155	-545	1722	467
1000 UANG DAN SIMPANAN (JUMLAH)	95	-11721	113	-6
1010 UANG DAN SIMPANAN DALAM VALUTA ASING	0	-2666	0	-942
1020 UANG DAN SIMPANAN DALAM RUPIAH	0	-9055	0	936
1021 UANG KERTAS DAN LOGAM	0	-2	0	776
1022 GIRO	0	-2338	0	107
1023 TABUNGAN	0	7	0	17
1024 DEPOSITO BERJANGKA	0	-6722	0	36
1030 TABUNGAN GIRO POS DAN KOPERASI	95	0	113	0
1100 SURAT BERHARGA JANGKA PENDEK	180	-2331	661	-2793
1200 PINJAMAN (JUMLAH)	10165	2210	6523	12069
1210 KREDIT BANK DALAM RUPIAH	7820	-5411	5640	662
1220 PINJAMAN INSTITUSI LAIN DALAM RUPIAH	301	9206	32	4513
1230 PINJAMAN DALAM VALUTA ASING	2044	-1585	851	6894
1300 MODAL (JUMLAH)	3269	7543	1174	14891
1400 SURAT BERHARGA JANGKA PANJANG (JUMLAH)	106	660	220	624
1410 SURAT BERHARGA PEMERINTAH	-1	0	0	0
1420 SURAT BERHARGA LAINNYA	107	660	220	624
1500 CADANGAN ASURANSI JIWA DAN PENSUN	622	0	499	0
1800 KREDIT DAGANG	3493	1792	2044	-1742
2000 KLAIM ANTARBANK	0	0	0	0
9000 RUPA-RUPA	-3635	16510	-3998	1440

KETERANGAN : P = Penggunaan, S = Sumber

<https://jakarta.bps.go.id>

BPS

KANTOR STATISTIK PROPINSI DKI JAKARTA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9

Telp. 3840084 JAKARTA

